

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
INDUSTRI KECIL MENENGAH**

(Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ADHE FILIMA FADIRIANTO  
NIM. 125030200111140**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS  
KONSENTRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  
MALANG  
2017**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

Disusun oleh : Adhe Filima Fadirianto

NIM : 125030200111140

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi/Minat : Manajemen Sumber Daya Manusia

Malang, Juli 2017

Komisi Pembimbing  
Ketua

**Moehammad Soe'oad Hakam, Drs, M.Si**  
**NIP. 19490717 197903 1 002**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 7 Agustus 2017  
Jam : 09.30  
Skripsi atas nama : Adhe Filima Fadirianto  
Judul : Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

dan dinyatakan

**LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua,

Anggota,

**Mochammad Soe'oad Hakam, Drs, M.Si**  
**NIP. 19490717 197903 1 002**

**Heru Susilo, Drs, MA**  
**NIP. 19591210 198601 1 001**

Anggota,

**M. Cahyo Widyo Sulisty, SE, MBA**  
**NIP.**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu UU No. 20 tahun 2013, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70.

Malang, Juli 2017

Adhe Filima F.  
125030200111140

## RINGKASAN

Adhe Filima Fadirianto, 2017. **Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah** (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang), Mochammad Soe'oad Hakam, Drs, M.Si.

---

Pembangunan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah merupakan salah satu motor penggerak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Usaha kecil dan menengah berperan untuk memperkuat perekonomian nasional. Pelaku ekonomi di Indonesia didominasi oleh usaha kecil dan menengah, terutama di sektor industri. Pembinaan dan pengembangan IKM perlu dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian di dalam penelitian ini terletak pada peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasar hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara narasumber dan dokumen-dokumen mengenai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, diketahui peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM bertujuan agar IKM menjadi kuat dan tidak gampang mati sehingga sektor industri tumbuh dan sektor ekonomi dapat berkembang mengingat peran IKM cukup besar terutama untuk penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan masyarakat. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang yaitu pada kegiatan pelatihan, promosi, dan *monitoring*. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bukan merupakan masalah yang relatif besar. Hambatan tersebut, sesuai dengan hasil wawancara narasumber, yaitu kurangnya antusias peserta pelatihan, motivasi peserta pelatihan yang tidak sesuai dengan harapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan sulitnya pelaku IKM untuk diajak berkembang. Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan berbeda menyesuaikan dengan hambatannya.

**Kata Kunci: Pembinaan dan Pengembangan, Disperindag Kota Malang, Industri Kecil Menengah**

## SUMMARY

Adhe Filima Fadrianto 2017. **The Role of Local Government in the Development and Development of Small and Medium Industry** (Study at the Department of Industry and Trade of Malang), Moehammad Soe'oad Hakam, Drs, M.Si.

---

Development and growth of small and medium enterprises is one of the driving force for development and economic growth in many countries in the world. Small and medium enterprises play a role in strengthening the national economy. Economic actors in Indonesia are dominated by small and medium enterprises, especially in the industrial sector. Coaching and development of SMEs needs to be done by the local government, especially the Department of Industry and Trade of Malang.

The type of research used in the preparation of this thesis is the type of descriptive research with qualitative approach. The focus of research in this research lies in the role of the Office of Industry and Trade of Malang City in the development and development of SMEs in Malang. Sources of data used are primary data and secondary data. The method used in analyzing research data consists of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

Based on the results of research obtained from interviews of informants and documents on the Department of Industry and Trade of Malang, known role of Industry and Trade Office of Malang City in coaching and development of IKM in Malang. The role of Industry and Trade Office of Malang City in the development and development of SMEs aims to make SMEs strong and not easy to die so that the industrial sector grows and the economic sector can grow considering the role of SMEs is large enough especially for employment and income sources community. The role of the Office of Industry and Trade of Malang City in the development and development of SMEs in Malang is in the training, promotion and monitoring activities. Obstacles in the implementation of coaching and development is not a relatively big problem. These obstacles, in accordance with the results of interviews of resource persons, the lack of enthusiasm of trainees, the motivation of participants who are not in accordance with the expectations of the Department of Industry and Trade of Malang and the difficulty of SMEs to be invited to grow. Efforts are made to deal with different barriers to adjust to the obstacles.

**Keywords: Coaching and Development, Department of Industry and Trade of Malang, Small and Medium Industry**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya berupa nikmat iman dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis.
3. Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos, MIB, DBA., selaku Sekretaris Jurusan Administasi Bisnis
4. Bapak Dr. Wilopo, MAB., selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis
5. Bapak M. Kholid Mawardi, PH.D., selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Bisnis.
6. Bapak Moehammad Soe’oed Hakam, Drs, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan, semangat, dan doa kepada penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai.
7. Seluruh Dosen Pengajar Administrasi Bisnis yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama ini.

8. Staf Akademik Administrasi Bisnis yang telah membantu melancarkan menyelesaikan skripsi.
9. Kedua Orang Tua saya yang selalu memberikan doa, dukungan, arahan dan semangat serta banyak berkorban untuk keberlangsungan perkuliahan saya hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang telah membantu memberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dalam memberikan informasi sebagai data.
11. Pelaku IKM (Ibu Nurul Hidayati pemilik IKM “Almira Handmade”, Ibu Retni pemilik IKM “Silver 999”, dan Bapak Solehudin pemilik IKM Keripik Tempe “Amel”) yang telah membantu memberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dalam memberikan informasi sebagai data.
12. Teman perkuliahan saya (Heri) yang telah meminjamkan laptop dan kamarnya serta setia mendampingi dalam mengumpulkan data dan pengerjaan skripsi demi keberlangsungan saya menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua sahabat dan teman-teman saya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saling memberi bantuan demi kelancaran skripsi ini dan telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

|                            | <b>Halaman</b>                          |
|----------------------------|---|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....    | i                                       |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | iii                                     |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> ..... | iv                                      |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b> ..... | v                                       |
| <br>                       |   |
| <b>BAB I</b>               | <b>PENDAHULUAN</b>                      |
| A.                         | Latar Belakang ..... 1                  |
| B.                         | Perumusan Masalah ..... 6               |
| C.                         | Tujuan Penelitian ..... 7               |
| D.                         | Manfaat Penelitian ..... 7              |
| E.                         | Sistematika Pembahasan ..... 9          |
| <br>                       |   |
| <b>BAB II</b>              | <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>                 |
| A.                         | Tinjauan Empiris ..... 10               |
| B.                         | Tinjauan Teoritis ..... 12              |
| 1.                         | Peranan Pemerintah Daerah ..... 12      |
| C.                         | Pembinaan dan Pengembangan ..... 23     |
| 1.                         | Pengertian ..... 23                     |
| 2.                         | Tujuan ..... 25                         |
| 3.                         | Strategi ..... 25                       |
| D.                         | Industri Kecil dan Menengah ..... 27    |
| 1.                         | Definisi dan Kriteria ..... 27          |
| 2.                         | Potensi ..... 29                        |
| 3.                         | Masalah yang Dihadapi ..... 32          |
| 4.                         | Pembinaan dan Pengembangan IKM ..... 35 |
| <br>                       |   |
| <b>BAB III</b>             | <b>METODE PENELITIAN</b>                |
| A.                         | Jenis Penelitian ..... 39               |
| B.                         | Fokus Penelitian ..... 40               |
| C.                         | Lokasi Penelitian ..... 41              |
| D.                         | Jenis dan Sumber Data ..... 42          |
| 1.                         | Data Primer ..... 42                    |
| 2.                         | Data Sekunder ..... 43                  |
| E.                         | Teknik Pengumpulan Data ..... 43        |
| 1.                         | Wawancara ..... 44                      |
| 2.                         | Dokumentasi ..... 44                    |
| F.                         | Instrumen Penelitian ..... 45           |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. Peneliti Sendiri.....            | 45 |
| 2. Pedoman Wawancara.....           | 46 |
| 3. Catatan Lapangan.....            | 46 |
| 4. Peralatan Penunjan Lapangan..... | 46 |
| 5. Dokumen.....                     | 47 |
| G. Analisis Data.....               | 47 |
| 1. Pengumpulan Data.....            | 48 |
| 2. Reduksi Data.....                | 48 |
| 3. Penyajian Data.....              | 48 |
| 4. Penarikan Kesimpulan.....        | 49 |

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

|   |     |
|---|-----|
| A. Hasil Penelitian.....  | 50  |
| 1. Gambaran Umum Kota Malang.....   | 50  |
| 2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.....   | 59  |
| 3. Keadaan IKM yang Ada di Kota Malang Saat Ini.....  | 66  |
| 4. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam Pembinaan dan Pengembangan IKM.....  | 69  |
| 5. Hambatan yang Ditemukan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.....                       | 87  |
| 6. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan.....   | 92  |
| B. Analisis Data dan Pembahasan tentang Hasil Penelitian.....   | 95  |
| 1. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan dan Pengembangan IKM di Kota Malang.....   | 95  |
| 2. Hambatan yang Ditemukan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.....                       | 99  |
| 3. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang..... | 100 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 102 |
| B. Saran.....      | 105 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>108</b> |
|----------------------------|------------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b> | <b>110</b> |
|-------------------------------|------------|

## DAFTAR TABEL

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>Tabel 1.1 Hasil Akhir Data Industri 2015.....</b>   | <b>3</b>       |
| <b>Tabel 2.1 Perkembangan Industri Tahun 2010-2013 .....</b>   | <b>27</b>      |
| <b>Tabel 2.2 Program-Program Prioritas Kegiatan Disperindag .....</b>  | <b>33</b>      |
| <b>Tabel 4.1 Perkembangan Industri Tahun 2010-2013 .....</b>   | <b>69</b>      |
| <b>Tabel 4.2 Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota<br/>Malang periode 2013-2018.....</b>    | <b>70</b>      |
| <b>Tabel 4.3 Pencapaian Tujuan Pembinaan dan Pengembangan IKM .....</b>  | <b>74</b>      |
| <b>Tabel 4.4 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penguasaan Teknologi dan<br/>Standarisasi Produk Industri .....</b> | <b>75</b>      |
| <b>Tabel 4.5 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya<br/>Manusia Industri .....</b>               | <b>76</b>      |
| <b>Tabel 4.6 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Inovasi Industri .....</b>  | <b>78</b>      |

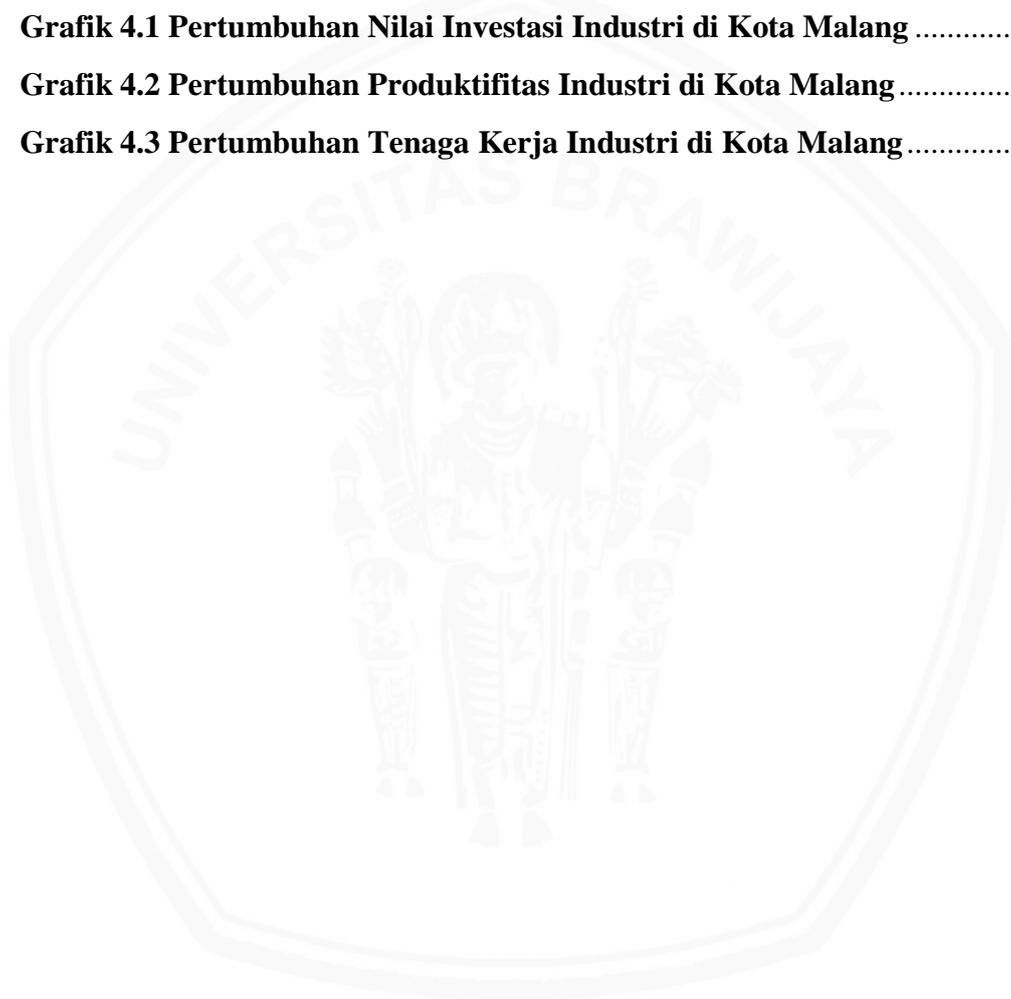
## DAFTAR GAMBAR

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>Gambar 2.1 Model Pengembangan Industri .....</b> | <b>31</b>      |



## DAFTAR GRAFIK

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>Grafik 2.1 Pertumbuhan Nilai Investasi Industri di Kota Malang .....</b> | <b>26</b>      |
| <b>Grafik 2.2 Pertumbuhan Produktifitas Industri di Kota Malang .....</b>   | <b>26</b>      |
| <b>Grafik 2.3 Pertumbuhan Tenaga Kerja Industri di Kota Malang .....</b>    | <b>27</b>      |
| <b>Grafik 4.1 Pertumbuhan Nilai Investasi Industri di Kota Malang .....</b> | <b>67</b>      |
| <b>Grafik 4.2 Pertumbuhan Produktifitas Industri di Kota Malang .....</b>   | <b>67</b>      |
| <b>Grafik 4.3 Pertumbuhan Tenaga Kerja Industri di Kota Malang .....</b>    | <b>68</b>      |





## Curriculum Vitae

Nama Lengkap : Adhe Filima Fadirianto  
NIM : 125030200111140  
Jenis Kelamin : Pria  
Tempat Tanggal Lahir: Malang, 28 Juli 1994  
Alamat : Jalan Bandara Palmerah 1 B 25 Malang  
Email : [adhefilima@gmail.com](mailto:adhefilima@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan : 2000-2006 SD Negeri 1 Sawojajar Malang  
2006-2009 SMP Negeri 5 Malang  
2009-2012 SMA Negeri 1 Malang  
2012-2017 Universitas Brawijaya Malang



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah merupakan salah satu motor penggerak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Usaha kecil dan menengah berperan untuk memperkuat perekonomian nasional. Pelaku ekonomi di Indonesia didominasi oleh usaha kecil dan menengah, terutama di sektor industri.

Industri kecil dan menengah merupakan usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor industri manufaktur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 Tahun 1999, industri kecil dan menengah mempunyai sedikit perbedaan dalam penggolongannya. Dapat disimpulkan bahwa industri kecil menengah atau IKM termasuk dalam usaha kecil menengah atau UKM.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif milik perseorangan dan (atau) badan usaha perseorangan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif milik perseorangan dan (atau)

badan usaha perseorangan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Sedangkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, industri kecil merupakan semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan industri menengah merupakan semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibedakan penggolongan IKM pada nilai investasinya.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, industri kecil menengah banyak tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, tidak sedikit juga tumbuh di masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Hal tersebut disebabkan karena IKM membutuhkan modal yang relatif kecil sehingga dapat dilakukan meskipun oleh perseorangan. Meningkatnya jumlah IKM yang tumbuh dan berkembang menjadikan IKM sebagai salah satu sendi perekonomian di Indonesia. Sektor ini memegang upaya penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah selayaknya memberikan perhatian yang layak untuk mengembangkannya, yaitu dipandang sebagai suatu kelompok unit usaha yang

seharusnya terintegrasi dalam dunia usaha secara nasional yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup dan daya saing.

Perhatian pemerintah dalam pengembangan IKM ditujukan agar semakin tangguh dan mandiri dalam mengembangkan potensi lokal serta mempercepat pembangunan daerah. Perlu adanya kebijakan oleh pemerintah untuk menciptakan suasana kondusif dalam pengembangan IKM. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu mendapat perhatian lebih oleh pemerintah. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia berdampak pada kreativitas dan inovasi pengembangan produk untuk bersaing di pasar global. Pemerintah harus lebih meningkatkan peran IKM selain mengembangkan hubungan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada pasal 14 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, urusan pemerintah kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, ciri khas, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pemerintah tersebut meliputi kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, pertahanan, lingkungan hidup, koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal, serta tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah, termasuk IKM.

Industri kecil dan menengah merupakan usaha yang mampu bertahan saat krisis ekonomi. Hal tersebut dapat dibuktikan pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia. Pada keadaan krisis tersebut banyak usaha besar yang gulung tikar, namun usaha kecil dan menengah mampu menjadi penopang perekonomian nasional. Usaha kecil dan menengah dapat bertahan selama masa krisis terutama pada sektor industri kecil dan menengah. Industri kecil menengah dapat bertahan karena sebagian besar IKM memproduksi barang konsumsi dan sebagian besar IKM menggunakan modal sendiri atau tidak mendapat modal dari bank maupun lembaga keuangan lainnya yang pada saat itu kondisi suku bunga dapat merugikan.

Pasca krisis moneter, industri kecil menengah berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Industri kecil menengah merupakan sabuk pengaman bagi perekonomian nasional. Industri kecil menengah menjadi alternatif dalam membuka lowongan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh industri kecil menengah berjumlah relatif besar (Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Hasil Akhir Data Industri 2015

| KECIL                     | INDUSTRI  |         |        | TOTAL     |
|---------------------------|-----------|---------|--------|-----------|
|                           | IAK       | ILMETA  | IATT   |           |
| Usaha (unit)              | 659.370   | 115.651 | 15.970 | 790.991   |
| Tenaga Kerja (orang)      | 1.487.599 | 300.120 | 33.687 | 1.821.406 |
| Nilai Pendapatan (milyar) | 64.080    | 9.486   | 284    | 73.850    |
| <b>MENENGAH</b>           |           |         |        |           |
| Usaha (unit)              | 11.341    | 4.561   | 3.244  | 19.146    |
| Tenaga Kerja (orang)      | 844.071   | 80.379  | 36.672 | 961.122   |
| Nilai Pendapatan (milyar) | 49.436    | 5.283   | 936    | 55.655    |

Sumber: Paparan Rapat Pendataan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur 2016

Mengacu pada data tabel 1.1, IKM mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang relatif besar. Meskipun industri besar juga dapat menyerap tenaga kerja, tetapi untuk memasuki pasar tenaga kerja industri besar dibutuhkan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Indonesia mayoritas penduduknya memiliki ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ekonomi yang lemah, memicu bertumbuh dan berkembangnya IKM.

Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki beragam sumber daya alam dan beragam sumber daya manusia karena memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap sehingga menjadi kota urban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa industri kecil dan menengah merupakan salah satu potensi strategis yang dimiliki oleh daerah. Adanya sinergi antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia maka akan memicu tumbuhnya IKM yang kreatif dan inovatif di Kota Malang. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya IKM yang tumbuh dan berkembang di kota Malang.

Pemerintah daerah yaitu pemerintah kota mempunyai kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memberikan fasilitas, bimbingan, pembinaan dan sebagainya. Pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran sentral dalam pembinaan industri kecil dan menengah di Kota Malang, mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas, bimbingan, dan bantuan lainnya. Salah satu tujuan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Malang adalah untuk menunjang IKM agar mampu bersaing secara kompetitif.

Pembinaan dan pengembangan IKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan salah satunya dengan mengadakan pelatihan. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk menjadikan sumber daya manusia lebih inovatif dan kreatif. Menurut Dessler (2009: 263), “pelatihan adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang ketrampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka.”

Berdasarkan uraian latar belakang tentang berbagai peranan IKM dan pentingnya peran pemerintah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah, (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Malang?
2. Hambatan apa saja yang ditemui dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan?

3. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menangani hambatan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Malang.
2. Menganalisis dan menjelaskan hambatan yang ditemui dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Menganalisis dan menjelaskan upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menangani hambatan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang ada dapat memberikan manfaat yang berarti, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun kepentingan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Malang.

- b. Mengetahui cara menganalisa hambatan yang ditemui dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menangani hambatan tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Malang.

### b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kepada akademisi mengenai peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Malang, serta mengetahui masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembinaan tersebut.

### c. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dan masukan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri menengah dan kecil untuk tahun-tahun berikutnya agar lebih optimal.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori dan pendapat para ahli yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas, serta kajian menurut penelitian skripsi terdahulu yang memiliki kesamaan fokus penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris (Penelitian Terdahulu)

##### 1. Arysta Putra Candra (2014)

Penelitian yang dilakukan Candra Arysta Putra mengambil judul “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak sebagai Produk Unggulan Daerah, studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan kerajinan perak sebagai produk unggulan daerah melalui peningkatan kemampuan finansial, pengembangan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia dan pemberian pengaturan serta pengendalian usaha. Hambatan dalam pengembangan kerajinan perak ini adalah mahalanya harga bahan baku, rendahnya kualitas sumber daya manusia serta akses terhadap modal yang masih minim.

##### 2. Subekti Lianda (2013)

Penelitian yang dilakukan Lianda Subekti mengambil judul “Implementasi Strategi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM, studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang”. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Implementasi strategi pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang memperhatikan kekuatan untuk meraih peluang keberhasilan, peluang untuk menekan kelemahan, kekuatan untuk menekan ancaman dan strategi untuk menekan kelemahan dan menghindari ancaman dalam pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM. Implementasi strategi pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM di Kota Malang belum berjalan dengan baik, karena kondisi riil di lapangan yang berubah-ubah.

### 3. Rosianti Windy (2014)

Penelitian yang dilakukan Windy Rosianti mengambil judul “Upaya Dinas Koperasi UKM dalam Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan untuk Meningkatkan Motivasi Berwirausaha, studi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Upaya Dinas Koperasi UKM dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan motivasi berwirausaha adalah analisis kebutuhan penelitian, efektifitas biaya, penggunaan instruktur profesional sesuai keahlian, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan peralatan peraga dan media pelatihan, menyiapkan materi pelatihan, kesesuaian waktu dengan peserta pelatihan, menyediakan konsumsi,

memberikan latihan studi kasus, memaksimalkan pemberian motivasi pada peserta, memberikan arahan berdasarkan bakat dan keinginan, memberikan bimbingan terkait profesi, menyediakan fasilitas pasca pelatihan, evaluasi dan *monitoring*. Pendidikan dan pelatihan didefinisikan sebagai salah satu pembinaan terhadap sumber daya manusia di samping adanya upaya lain. Pendidikan dan pelatihan merupakan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya.

## **B. Pemerintah Daerah**

### **1. Peranan Pemerintah Daerah**

#### **a. Pengertian Peranan**

Pengertian peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Dan kata peran memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat sedangkan peranan diartikan sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Selain itu, peranan menurut Soekanto (2009: 213) adalah:

“Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menurut Levinson dalam (Soekanto, 2009: 213) mengatakan peranan mencakup tiga hal antara lain:

- (1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- (3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang maupun kelompok yang berdasar pada suatu ketentuan yang ada. Dengan adanya peranan ini terdapat tanggung jawab yang dilakukan seseorang atau kelompok tersebut sesuai dengan peranannya.

#### **b. Pengertian Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diselesaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

### **c. Peran Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 25, kepala daerah memiliki peran atau tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- 3) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- 5) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- 6) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kandungan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, wakil kepala daerah memiliki peran atau tugas dan wewenang:

- 1) membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- 2) membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau

temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

- 3) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- 4) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- 5) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- 6) melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- 7) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Perangkat daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat disimpulkan masing-masing mempunyai peran atau tugas dan fungsi yaitu:

- 1) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat daerah mempunyai fungsi:
  - a) penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
  - b) pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
  - d) pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan

- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
- a) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c) penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- 3) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat mempunyai fungsi:
- a) perencanaan program pengawasan;
  - b) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
  - c) pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.



- 4) Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai fungsi:
  - a) perumusan kebijakan teknis perencanaan;
  - b) pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  - c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
  - d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah mempunyai fungsi:
  - a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Kecamatan merupakan wilayah kerja yang dipimpin oleh camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat bertugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 8) Kelurahan merupakan wilayah kerja yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. Tugas dan fungsi lurah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan merupakan peran atau tugas dan wewenang pemerintah daerah secara rinci. Peran atau tugas dan wewenang pemerintah daerah secara luas menurut Smith dalam (Muluk, 2009: 111), pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan

secara pasti. Pemahaman tersebut merupakan pemahaman pemerintah klasik yang banyak digunakan sebagai literatur.

#### **d. Urusan Pemerintah Daerah**

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 11 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib akan dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah apabila berpedoman pada standar pelayanan minimal.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 14 ayat (1) dan (2) tertulis bahwa,

urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- 1) perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 2) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- 3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4) penyediaan sarana dan prasarana umum;
- 5) penanganan bidang kesehatan;
- 6) penyelenggaraan pendidikan;
- 7) penanggulangan masalah sosial;
- 8) pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- 9) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 10) pengendalian lingkungan hidup;
- 11) pelayanan pertanahan;
- 12) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- 13) pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- 14) pelayanan administrasi penanaman modal;
- 15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- 16) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, ciri khas, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Mengacu terhadap uraian tersebut dapat disimpulkan, pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, yang di dalamnya juga termasuk industri kecil dan menengah, menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**e. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengembangan**

Sesungguhnya banyak organisasi yang telah terlibat dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah. Hal ini menunjukkan bahwa industri kecil dan menengah mempunyai potensi yang layak untuk dibina dan dikembangkan. Menurut Iwantono (2003: 12),

“pada umumnya pembinaan dapat dilakukan melalui kelompok atau dibina melalui koperasi. Bentuk-bentuk pembinaan lebih difokuskan pada bidang pendidikan dan pelatihan, konsultasi, penyuluhan, kewirausahaan, pengembangan ekonomi wanita pengusaha, program peningkatan pendapatan keluarga, pembinaan kelompok, koperasi wanita dan asosiasi wanita pengusaha, dan program pengentasan kemiskinan lainnya.”

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa selain pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat juga turut berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah. Pemerintah daerah wajib memberikan fasilitas dalam pengembangan, terutama dalam bidang:

- 1) Produksi dan pengolahan, yaitu dilakukan dengan cara:

- a) meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen;
  - b) memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan; dan
  - c) mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- 2) Pemasaran, yaitu dengan cara:
- a) melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
  - b) menyebarluaskan informasi pasar;
  - c) meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
  - d) menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha;
  - e) memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
  - f) menyediakan tenaga konsultan profesional bidang pemasaran.
- 3) Sumber daya manusia, yaitu dengan cara:
- a) memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
  - b) meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial;
  - c) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan,



motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

- 4) Desain dan teknologi, yaitu dengan cara:
  - a) meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi;
  - b) meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
  - c) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
  - d) memberikan insentif kepada yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - e) mendorong untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 5, yaitu:

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan melalui:

- 1) pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
- 2) penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
- 3) pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
- 4) pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui pendekatan:

- 1) koperasi;
- 2) sentra;
- 3) klaster; dan
- 4) kelompok.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memfasilitasi dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu diberikan berdasarkan klasifikasi dan tingkat

perkembangan industri kecil dan menengah. Pembagian klasifikasi dan tingkat perkembangan meliputi:

- 1) kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
- 2) penentuan klasifikasi;
- 3) pendekatan pengembangan;
- 4) bentuk fasilitas; dan
- 5) jangka waktu fasilitasi.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan sangat penting dan mendominasi. Meskipun juga banyak organisasi non pemerintah yang ikut terlibat, pembinaan dan pengembangan IKM tetap menjadi tugas utama pemerintah daerah.

## **C. Pembinaan dan Pengembangan**

### **1. Pengertian Pembinaan dan Pengembangan**

#### **a. Pembinaan**

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “bina”, pembinaan berarti memperbaharui, proses atau perbuatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Poerwadarminta (2006: 182), pembinaan adalah yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek dengan tindakan pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya, pembinaan menurut Miftah Thoha (2008: 7) adalah:

“Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini, yakni pembinaan itu sendiri bisa serupa suatu tindakan, proses atau pertanyaan dari suatu tujuan, dan kedua, pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas “sesuatu”.

Dari beberapa uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam aktivitas pembinaan terdapat kegiatan pengembangan dan penyempurnaan serta penemuan hal-hal baru. Dapat diartikan bahwa pembinaan IKM merupakan suatu upaya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi terhadap IKM yang ada melalui pembaharuan, pengaturan dan pengawasan untuk mencapai kondisi yang lebih baik lagi.

#### **b. Pengembangan**

Pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan proses, cara, perbuatan mengembangkan, sedangkan mengembangkan merupakan perintah selalu berusaha di pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus pada sasaran yang dikehendaki.

Sesuai dengan uraian tersebut, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa,

pengembangan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## 2. Tujuan Pembinaan dan Pengembangan

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 3 dituliskan tujuan industri kecil menengah dan usaha kecil menengah adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. IKM juga mempunyai tujuan pemberdayaan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 5, yaitu:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

IKM dalam kegiatannya tentu juga mempunyai tujuan internal. Tujuan internal IKM berdasarkan visi dan misi perusahaan. Secara umum tujuan internal IKM dalam kegiatannya tentu untuk mencari laba sebesar-besarnya dan juga mensejahterakan lingkungan sekitarnya.

## 3. Strategi Pembinaan dan Pengembangan

Dalam pembinaan dan pengembangan diperlukan strategi. Strategi dilakukan agar kegiatan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan tepat sasaran sesuai dengan masalah-masalah yang dialami. Menurut Primiana (2009: 42) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Tingkatkan produktivitas masyarakat miskin. Tidak memberikan insentif/subsidi kepada masyarakat miskin, tetapi membuat proyek-proyek padat karya yang melibatkan masyarakat banyak.

- b. Mengkaji ulang tentang otonomi daerah, agar diperoleh kejelasan hirarki/kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, penyediaan infrastruktur, mekanisme pembagian hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Diperlukan data base potensi ekonomi lokal berikut informasi pasar lokal, regional, dan global agar pemerintah tidak salah dalam menetapkan kebijakan.
- c. Meningkatkan sinergi antara UKM dan usaha besar, termasuk IKM dan industri besar. Dengan harapan agar tidak melakukan impor barang dan jasa yang bisa diproduksi sendiri guna mendorong kompetisi lokal dan menitikberatkan pada penguatan ekonomi lokal guna menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi untuk mengantisipasi masuknya komoditi sejenis dan substitusi dengan kualitas baik dan harga lebih murah yang masuk secara ilegal maupun legal.
- d. Menghindari program-program yang tumpang tindih serta tidak terukur kemajuannya. Seluruh program harus terukur dan jelas *outcomenya*, artinya memiliki efek jangka panjang. Dibutuhkan analisis lingkungan yang tepat, akurat, dan menyeluruh baik secara eksternal maupun internal yang memperkuat atau memperlemah struktur perekonomian negeri ditinjau dari berbagai sektor.
- e. Membuat *Blue Print* jangka panjang, agar masyarakat dapat mengetahui seluruh program diarahkan seperti apa dalam pencapaiannya. Dengan adanya transparansi diharapkan program-program pemerintah yang baik tetap dilanjutkan meskipun pejabat sudah ganti.

Pada rencana strategis yang telah disusun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terdapat strategi yang telah dirumuskan untuk menangani masalah-masalah yang terjadi. Strategi yang telah disusun tersebut yaitu:

- a. Peningkatan kemampuan teknologi industri dan sumber daya manusia, pengembangan inovasi dan standarisasi produk industri melalui kerjasama dengan Instansi vertikal, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan swasta.
- b. Memperkuat dan memperluas pasar dalam dan luar negeri.
- c. Meningkatkan tertib ukur, standarisasi mutu barang dan pemberdayaan konsumen.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan IKM di Indonesia diperlukan sinergi antar instansi yang berfungsi sama, agar mendapat gambaran jelas potensi yang dimiliki IKM dari tiap waktu ke waktu. Hal ini dilakukan untuk

menghindari terjadinya pembinaan dan pengembangan yang tidak tepat sasaran, serta agar strategi yang diterapkan dalam pembinaan dan pengembangan sesuai dengan masalah-masalah yang dialami IKM. Perlu juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi setempat untuk turut serta dalam pembinaan dan pengembangan IKM agar dapat meningkatkan daya saing IKM.

#### **D. Industri Kecil dan Menengah (IKM)**

##### **1. Definisi dan Kriteria IKM**

Industri kecil dan menengah dapat dikategorikan dalam usaha kecil dan menengah, karena merupakan usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang sektor industri manufaktur. Industri kecil dan menengah merupakan tanggung jawab dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Koperasi dan UKM. Untuk perumusan kebijaksanaan dan penerapannya, termasuk pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan, merupakan tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Industri kecil menengah dan usaha kecil menengah mempunyai perbedaan pengertian tetapi masih saling berkaitan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif milik perseorangan dan (atau) badan usaha perseorangan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif milik perseorangan dan (atau) badan usaha perseorangan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Sedangkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, industri kecil merupakan semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan industri menengah merupakan semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggolongan industri kecil dan menengah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan nilai investasi dan penghasilan, namun penggolongan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 Tahun 1999 berdasarkan nilai investasi saja.

Menurut Badan Pusat Statistik, penggolongan perusahaan industri semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan nilai modal industri tersebut.

Perusahaan Industri dibagi dalam 4 golongan yaitu:

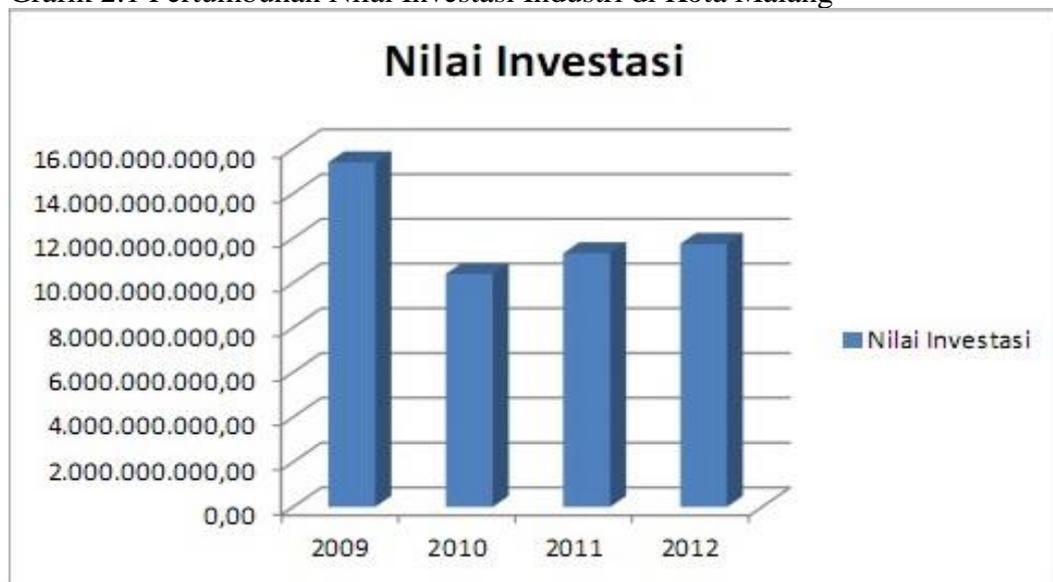
- a. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih)
- b. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang)
- c. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang)
- d. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang)

Meskipun antara usaha kecil dan menengah dengan industri kecil dan menengah mempunyai sedikit perbedaan definisi berdasarkan nilai modalnya, dapat disimpulkan bahwa industri kecil dan menengah merupakan usaha kecil yang bergerak di sektor industri dengan mempekerjakan 5-19 orang, dan industri menengah merupakan usaha menengah yang bergerak di sektor industri dengan mempekerjakan 20-99 orang.

## **2. Potensi IKM**

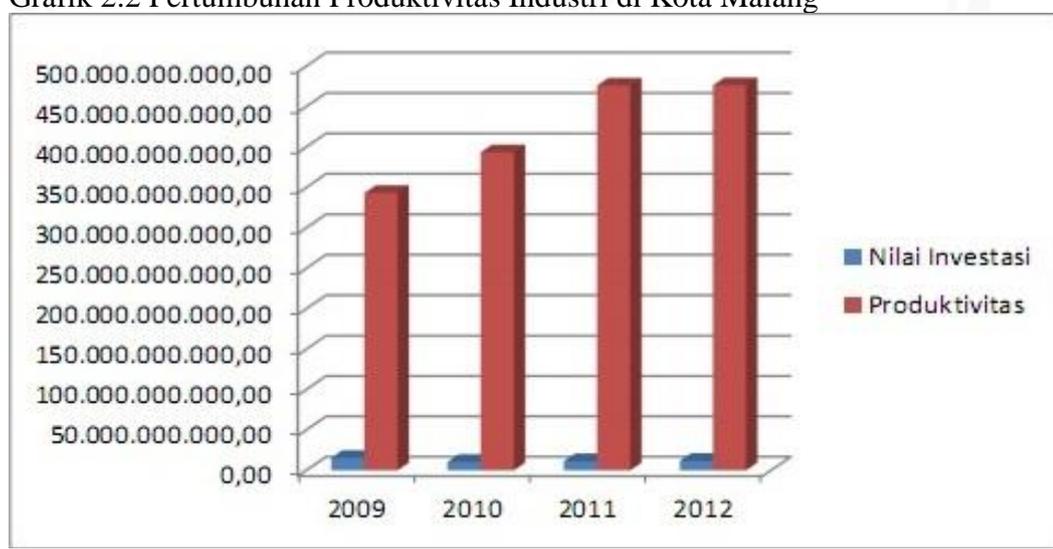
Kota Malang termasuk dalam kota yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Selain sumber daya alam yang melimpah juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten, karena Kota Malang memiliki fasilitas pendidikan lengkap sehingga menjadi kota urbanisasi bagi mereka yang ingin menimba ilmu. Adanya sinergi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat meningkatkan berkembangnya industri-industri di kota ini. Dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang periode 2013-2018 disebutkan sektor industri masih menjadi penyumbang tertinggi dalam PRDB. Pertumbuhan nilai investasi, produktivitas, dan tenaga kerja sektor industri terus menunjukkan peningkatan, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.1 Pertumbuhan Nilai Investasi Industri di Kota Malang



Sumber: Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang periode (2013-2018)

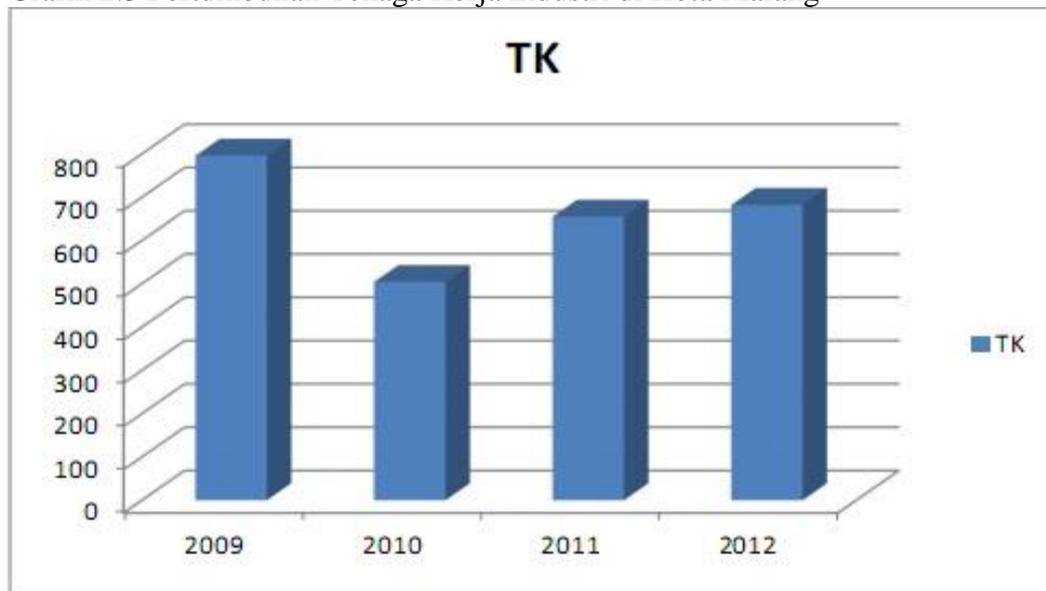
Grafik 2.2 Pertumbuhan Produktivitas Industri di Kota Malang



Sumber: Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang periode (2013-2018)



Grafik 2.3 Pertumbuhan Tenaga Kerja Industri di Kota Malang



Sumber: Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang periode (2013-2018)

Selama tahun 2010-2013 jumlah usaha industri kecil dan menengah mencapai 853 unit, terdiri dari 374 unit industri logam, mesin, elektronik, tekstil dan aneka serta IATT, dan 479 unit industri agro, kimia, dan hasil hutan.

Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Perkembangan Industri Tahun 2010-2013

| Uraian                      | Tahun |      |      |      |
|-----------------------------|-------|------|------|------|
|                             | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Industri Besar              | 5     | 5    | 5    | 5    |
| Industri Kecil dan Menengah | 834   | 844  | 848  | 853  |
| Sentra Industri             | 914   | 914  | 914  | 914  |
| Industri Non Formal         | 1471  | 1486 | 1506 |      |

Sumber: Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang periode (2013-2018)

Dari data tabel di atas menunjukkan IKM di Kota Malang mempunyai potensi berkembang, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah IKM tiap tahun. Untuk itu sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah.

### 3. Masalah yang Dihadapi IKM

Meskipun industri kecil dan menengah menjadi salah satu usaha yang mampu bertahan saat krisis ekonomi, permasalahan klasik masih menjadi beban yang terus menyertai. Permasalahan tersebut terutama pada modal dan peluang usaha. Peluang usaha yang sulit didapatkan bisa disebabkan karena sebagian besar pelaku industri kecil dan menengah masih lemah dalam manajemen bisnisnya. Menurut Primiana (2009: 19), berbagai masalah yang dialami meliputi:

- a. Permodalan
  - 1) Kurangnya akses ke Bank, lembaga kredit, atau sumber pembiayaan lainnya.
  - 2) Prosedur pemberian kredit yang berbelit-belit, lama, dan suku bunga yang tinggi.
  - 3) Bank kurang memahami kriteria IKM.
  - 4) Kurang mampu membuat standar proposal yang baik dan benar.
  - 5) Kurangnya pembinaan tentang manajemen keuangan.
  - 6) Kredit yang diperlukan tidak jelas.
- b. Pemasaran
  - 1) Akses terhadap informasi pasar kurang.
  - 2) Terbatasnya tempat pemasaran.
  - 3) Kesulitan mencari agen.
  - 4) Kuatnya persaingan pasar dan produk.
  - 5) Kurangnya manajemen pemasaran.
  - 6) Kemampuan negoisasi yang lemah.
  - 7) Mahalnya sewa sarana dan tempat penjualan.
  - 8) Kurang kerjasama dengan perusahaan besar, sesama IKM, pihak luar negeri.
  - 9) Kelembagaan pendukung tidak membantu promosi.
  - 10) Penjiplakan/pemalsuan produk.
- c. Bahan baku
  - 1) Harga bahan baku yang mahal dan berfluktuasi.
  - 2) Ekspor/impor yang berlebihan.
  - 3) Bahan baku yang dibutuhkan tidak diproduksi lagi.
  - 4) Kesulitan penyimpanan.
  - 5) Pengiriman tidak tepat waktu.
  - 6) Prosedur impor bahan baku tidak jelas.
  - 7) Lokasi bahan baku jauh.
  - 8) Terbatasnya liveransir bahan baku.

- 9) Kurangnya informasi tentang sumber bahan baku.
  - 10) Kurang kerjasama dengan perusahaan besar dalam pengadaan bahan baku.
- d. Teknologi
- 1) Kurangnya pelatihan untuk teknologi baru/tepat guna.
  - 2) Kurang terampil dan rendahnya pendidikan dalam menggunakan teknologi baru.
  - 3) Kurangnya informasi tentang teknologi baru/tepat guna yang sesuai kebutuhan.
  - 4) Mahalnya pemeliharaan.
  - 5) Harga yang mahal.
  - 6) Mutu yang rendah.
  - 7) Sistem perijinan dan pencemaran.
  - 8) Kurangnya penelitian tentang teknologi yang sesuai.
  - 9) Tidak mampu mempertahankan tenaga yang terampil.
- e. Manajemen
- 1) Tidak ada pembagian kerja.
  - 2) Kuatnya pengaruh perseorangan.
  - 3) Tercampurnya keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga.
  - 4) Kurang mampu mengadakan perencanaan, pencatatan, dan pelaporan.
  - 5) Asosiasi yang tidak berfungsi.
  - 6) Manajer kurang mampu merancang strategi bisnis.
  - 7) Rendahnya produktivitas pekerja.
- f. Birokrasi
- 1) Kurangnya informasi tentang perijinan.
  - 2) Pelayanan yang kurang sesuai dengan kebutuhan.
  - 3) Pungutan tidak jelas.
  - 4) Adanya monopoli.
  - 5) Kurangnya dukungan dengan berbagai kebijakan yang berpihak pada IKM.
  - 6) Adanya kuota ekspor.
- g. Infrastruktur
- 1) Tarif mahal.
  - 2) Pelayan kurang.
  - 3) Kualitas/kuantitas barang.
- h. Kemitraan
- 1) Sistem pemasaran bersama banyak merugikan.
  - 2) Sistem pembayaran yang merugikan.
  - 3) Kurangnya transfer teknologi.

Dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang periode 2013-2018 dijelaskan berbagai masalah yang dialami oleh para pelaku industri, yaitu:

- a. Pergeseran paradigma ekonomi industri ke ekonomi kreatif menurut upaya pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas untuk mendorong perekonomian yang berdaya saing dan menggali cadangan sumber daya yang terbarukan.
- b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) mendorong adanya efisiensi produksi untuk menghasilkan produk berkualitas dengan harga bersaing. Pengembangan inovasi dan fasilitas teknologi bagi industri kecil dan menengah menjadi program wajib sebagai upaya peningkatan daya saing sektor industri.
- c. Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.
- d. Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan kepada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi *market acceptability*.
- e. Pasar bebas tenaga kerja akan diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNNI).

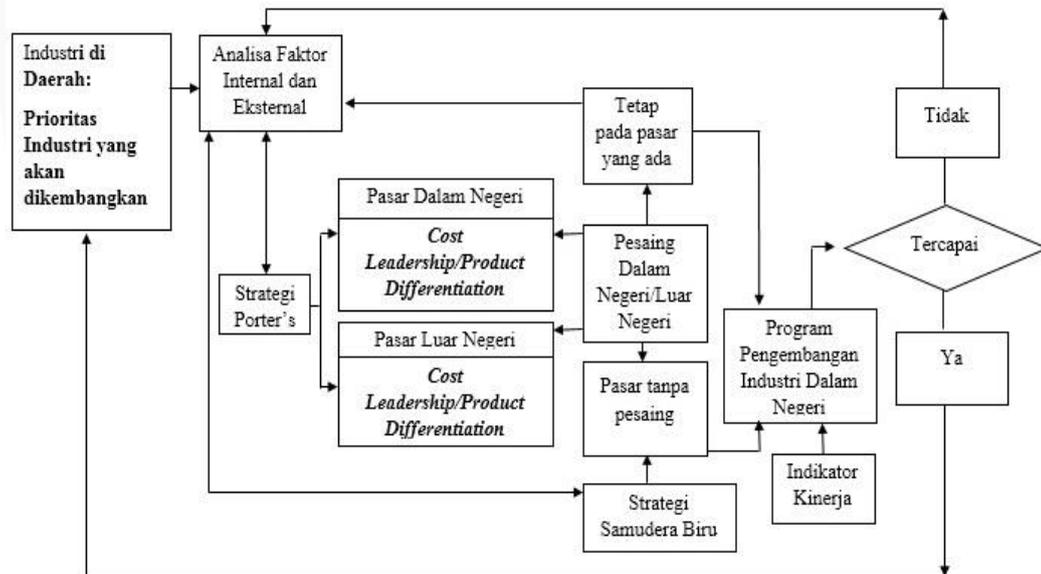
Dari uraian masalah tersebut maka diperlukan solusi untuk membentuk IKM yang kuat dan mandiri. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam kondisi ini, yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan. Pemerintah daerah diharapkan memberikan kemudahan dalam pemberian kredit, tetapi tidak dengan pukol rata kepada semua pelaku IKM. Industri kecil menengah yang tampak berpotensi akan menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah daerah dapat mempertahankan atau meningkatkan jumlah IKM dengan membina dan

mengembangkan kekhasan dari tiap-tiap wilayah untuk dijadikan sebagai potensi dalam mencari pasar.

#### 4. Pembinaan dan Pengembangan IKM

Setiap industri memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Strategi yang digunakan dalam membina dan mengembangkannya akan berbeda pula. Kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan harus tepat sasaran. Hal tersebut seperti teori pengembangan Porter's dan Samudra biru dalam (Primiana, 2002: 124). Model pengembangan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Model Pengembangan Industri



Sumber: Primania 2002

Gambar 2.1 merupakan suatu rangkaian tertutup yang merupakan pola berpikir sistem. Menurut Primania (2002: 122) penjelasan gambar tersebut yaitu:

- a. Menetapkan industri yang ada di setiap daerah, dan menetapkan urutan prioritas industri yang akan dikembangkan. Adapun indikator

- yang digunakan untuk menetapkan prioritas antara lain melihat sejauh mana industri tersebut dapat menggerakkan ekonomi masyarakat agar menjadi lebih sejahtera serta jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. Membuat profil industri di masing-masing daerah dengan melakukan analisis internal dan eksternal untuk mengetahui strategi yang dibutuhkan guna mengembangkan industri tersebut. Pada tahap ini dikembangkan strategi-strategi awal atas dasar analisis internal dan eksternal.
  - c. Menentukan strategi Porter's. Porter's mengelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu pasar dalam negeri atau pasar luar negeri. Dari dua kelompok tersebut masing-masing memiliki dua strategi agar memiliki keunggulan bersaing yaitu strategi *Cost leadership* atau *product differentiation*. Baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri memiliki pesaing yang juga berasal baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada saat inilah industri harus menentukan apakah akan tetap berada dalam pasar saat ini atau pindah mencari ruang pasar tanpa pesaing yang dikenal dengan strategi samudra biru.
  - d. Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa baik strategi Porter's maupun strategi samudra biru tidak dapat terlepas dari analisis internal dan eksternal yang harus dilakukan secara periodik agar kondisi riil di lapangan tetap *up to date* untuk menghindari kesalahan dalam menetapkan strategi. Bila program berhasil dapat dilanjutkan untuk industri lain yang akan dikembangkan berdasar urutan prioritas, sementara bila belum berhasil kembali lagi pada analisis internal dan eksternal.

Dalam Tambunan (2002: 138) menerangkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki sejumlah program-program prioritas yang langsung maupun tidak langsung bermanfaat bagi pengembangan IKM di sektor industri manufaktur dan sektor perdagangan. Program-program tersebut dibagi ke dalam sejumlah aspek, yakni pemasaran dan promosi, peningkatan kualitas SDM, pengembangan proses produksi dan teknologi, sistem kredit finansial spesial untuk IKM, pengembangan infrastruktur dan lingkungan bisnis, pengembangan kemitraan, kapasitas pengembangan kelembagaan, dan program-program pendukung. Hal tersebut akan dijelaskan lebih rinci dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2 Program-Program Prioritas Kegiatan Disperindag

| Program   | Kegiatan   |
|---|--|
| a. Pemasaran dan Promosi                            | 1) Pembangunan <i>trading house</i> yang terintegrasi                                |
|   | 2) Pembangunan sistem distribusi   |
|   | 3) Pembangunan jalur pemasaran   |
|   | 4) Partisipasi dalam pameran di dalam maupun luar negeri                             |
| b. Pengembangan SDM                                 | 1) Pengembangan kewirausahaan  |
|   | 2) Pengembangan keahlian teknis  |
|   | 3) Pengembangan keahlian manajerial  |
| c. Pengembangan Produksi dan Teknologi              | 1) Penyempurnaan ISO 9000  |
|   | 2) Pemanfaatan Pusat Desain Nasional dan pengembangan desain promosi                 |
|   | 3) Implementasi dan pengembangan informasi teknologi                                 |
|   | 4) Promosi lembaga penelitian dan pengembangan untuk peralihan teknologi             |
| d. Sistem kredit finansial untuk IKM                | 1) Dana bergulir lewat Lembaga Pendanaan terintegrasi-Industri dan Perdagangan Kecil |
|   | 2) Kerja sama dengan bank nasional   |
| e. Jasa-jasa informasi                              | 1) Pendirian pusat informasi mengenai pasar, komoditas, dan teknologi                |
| f. Pengembangan infrastruktur dan lingkungan bisnis | 1) Harmonisasi dari peraturan tarif dan non tarif                                    |
| g. Pengembangan kemitraan                           | 1) Penyuluhan/pendampingan   |
|   | 2) Menyelenggarakan temu bisnis  |
| h. Kapasitas pengembangan kelembagaan               | 1) Promosi pemberi jasa pengembangan bisnis dan jasa-jasa pendampingan/penyuluhan    |
| i. Program-program pendukung                        | 1) Monitoring dan evaluasi   |
|   | 2) Sinkronisasi dan koordinasi dari kebijaksanaan pembangunan IKM                    |
|   | 3) Bantuan teknis  |
|   | 4) Bantuan non-teknis  |

Sumber: Tambunan 2002

Pembinaan dan pengembangan IKM merupakan salah satu tugas dari peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana tercermin dalam Perda Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah bab 20 pasal 37. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang industri dan perdagangan. Tugas tersebut dilakukan secara aplikatif seperti yang dituliskan dalam LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur yakni:

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
- b. Meningkatkan daya saing industri manufaktur melalui:
  - (1) Pengembangan industri kecil dan menengah
  - (2) Peningkatan nilai tambah industri berbasis sumber daya alam
  - (3) Peningkatan kapasitas teknologi industri
  - (4) Peningkatan kualitas SDM
  - (5) Peningkatan standarisasi industri
- c. Meningkatkan ekspor non-migas dan pengendalian impor.
- d. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dalam kaitannya dengan menciptakan stabilitas harga pokok dan mengendalikan inflasi, memberdayakan komoditi agro melalui pelaksanaan pasar lelang komoditi agro.
- e. Meningkatkan perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan tertib niaga dan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar ilegal, sertifikasi mutu barang.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berbagai macam metode dapat digunakan untuk memberikan arahan bagi peneliti untuk memudahkan jalannya penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2004: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian kuantitatif lainnya, salah satu ciri tersebut menurut Lincoln dan Guba dalam (Moleong, 2004: 9) yaitu,

“penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.”

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian kualitatif dapat disimpulkan merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh peneliti seperti, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., dan dijelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Lincoln dan Guba dalam (Moleong, 2004: 11) merupakan penelitian dengan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan

oleh adanya penerapan metode kualitatif. Pertanyaan dengan kata tanya mengapa, apa, dan bagaimana akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Nazir (2005:54), penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Berdasarkan definisi tersebut, penelitian dengan pendekatan deskriptif dapat disimpulkan merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis secara jelas mengenai fakta atau keadaan yang terjadi pada suatu objek yang diteliti.

Sesuai dengan beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian dengan uraian yang sistematis, faktual, akurat, dan jelas. Dengan demikian, penelitian tentang “Peranan Pemerintah Kota dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah” cocok dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian fungsinya adalah membatasi studi penelitian agar objek penelitian tidak terlalu luas. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif terdapat suatu fokus yang biasa disebut dengan batasan masalah. Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Peran Pemerintah Kota dalam pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang:
  - a. Pelatihan
  - b. Pemagangan
  - c. Promosi
  - d. *Monitoring* dan evaluasi
2. Faktor penghambat dalam pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
3. Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan dalam pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

### **C. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka situs penelitian yang dipilih peneliti yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, yang berlokasi di Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 3, Jalan Mayor Jenderal Sungkono Kota Malang. Pertimbangan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan aspek kemudahan dalam mendapatkan informasi dimana peneliti berdomisili di Kota Malang. Selain itu dipilihnya lokasi di Kota Malang dikarenakan terdapat 1.988 industri yang telah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dimana jumlah tersebut relatif banyak.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan instansi yang berperan penting dalam pembinaan dan pengembangan IKM. Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yaitu membina dan mengembangkan IKM di Kota Malang. Penetapan situs penelitian didasarkan pada letak titik peneliti menemukan data yang *valid* dan akurat untuk dijadikan sebagai referensi atau bahan dalam melakukan sebuah penelitian.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah subjek data yang diperlukan dapat diperoleh. Semua data yang diperoleh akan dikumpulkan dan kemudian dibuat suatu kesimpulan yang menjadi hasil akhir dari sebuah penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan data primer dan data sekunder yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Pihak yang dimaksud antara lain:

- a. Kepala bidang pembinaan dan pengembangan IKM di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
- b. Staf teknis bidang pembinaan dan pengembangan IKM di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
- c. Pelaku IKM di Kota Malang.

Penentuan pemilihan pihak tersebut dengan cara memilih orang-orang atau informan yang dianggap lebih mengetahui mengenai pembinaan IKM dan memiliki informasi akurat untuk dijadikan sebagai informan dalam penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan secara tertulis ataupun gambar yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen resmi, catatan, laporan rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang dapat memberikan informasi terkait dengan masalah penelitian.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dengan tujuan untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan diolah sehingga dapat disajikan dengan bentuk yang mudah dipahami. Menurut Hasan (2003: 83), pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.

Terdapat berbagai cara untuk melakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Menurut Moleong (2004: 186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pernyataan itu. Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung atau wawancara membutuhkan alat yang dinamakan panduan wawancara untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada:

- a. Kepala bidang pembinaan dan pengembangan IKM di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
  - b. Staf teknis bidang pembinaan dan pengembangan IKM di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
  - c. Pelaku IKM di Kota Malang.
2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik, menurut Guba dan Lincoln dikutip (Moleong 2004: 216). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, merupakan pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui pencatatan, analisis, dan memanfaatkan

data yang disediakan oleh instansi. Dalam hal ini dokumentasi yang didapat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah rencana strategis 2015 serta foto-foto dokumentasi pameran dan pelatihan IKM.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu pada waktu penelitian. Instrumen penelitian berperan sebagai alat bantu bagi peneliti untuk mengumpulkan data agar mudah untuk diolah. Menurut Sugiyono (2008: 223), dalam penelitian kualitatif pada awalnya permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang akan menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan dipelajari jelas, maka dikembangkan suatu instrumen. Beberapa instrumen yang dapat digunakan peneliti sesuai dengan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Peneliti Sendiri

Menurut Moleong (2004: 168), kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Sesuai pendapat tersebut maka peneliti berperan sebagai objek sekaligus sebagai subjek data penelitian untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

## 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebagai pedoman bagi peneliti untuk melakukan wawancara dengan informan atau narasumber. Pedoman wawancara digunakan dengan tujuan untuk memfokuskan pada permasalahan penelitian agar memperoleh data yang terkait dengan masalah penelitian. Fokus dari wawancara ini yakni kepala bidang pembinaan dan pengembangan IKM di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, staf teknis bidang pembinaan dan pengembangan IKM di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

## 3. Catatan Lapangan

Catatan lapangan merupakan alat atau catatan yang dibuat oleh peneliti saat melakukan pengamatan, wawancara, maupun saat menyaksikan kejadian tertentu. Catatan lapangan ini berkaitan dengan peranan Dinas perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan dan pengembangan IKM, yang kemudian dikemas sebagai bahan informasi tambahan dalam analisa data.

## 4. Peralatan Penunjang Lapangan

Peralatan penunjang lapangan merupakan alat yang digunakan dalam keperluan mengumpulkan data, seperti alat perekam suara dan kamera. Alat tersebut digunakan untuk merekam suara dan mengambil gambar kegiatan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data.

## 5. Dokumen

Menurut Moleong (2004: 216), dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen yang dimaksud dapat berupa salinan arsip atau catatan resmi yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

## G. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam (Moleong, 2004: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah, mensintesiskannya, menemukan pola, menemukan yang penting, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Sedangkan menurut Seiddel dalam (Moleong, 2004: 248), analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya,
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Mengorganisasikan data dilakukan dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorisasikannya dengan tujuan menemukan tema dan hipotesis kerja.

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Moleong, 2004: 307) yaitu, terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data, sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, yaitu terdiri dari wawancara dan dokumentasi dengan para narasumber yang relevan dengan fokus penelitian, seperti kepala dan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, serta pelaku IKM di Kota Malang.
2. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang terdapat di lapangan. Dalam penelitian ini reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan data meliputi gambaran umum, wawancara dengan kepala dan staf yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan, dan wawancara dengan pelaku IKM. Data hasil perolehan tersebut kemudian digolongkan, diarahkan, dan diorganisasikan dengan membuang hal yang tidak perlu sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk mempertajam data yang berhubungan dengan judul penelitian.
3. Penyajian data, merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis dan memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti melakukan reduksi data yang kemudian disajikan. Data yang dimaksud meliputi peran pemerintah kota dalam pembinaan dan pengembangan IKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, faktor penghambat pelaksanaan peran pemerintah kota dalam pembinaan dan pengembangan IKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Penyajian data ini juga diikuti oleh analisis data yakni data yang telah direduksi diinterpretasikan oleh peneliti dan juga dihubungkan dengan fokus penelitian.

4. Penarikan kesimpulan, merupakan bagian akhir kegiatan analisis yang berupa pengelompokan data yang sudah diolah dan disajikan secara sistematis serta pada akhirnya ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan berdasarkan analisis pembahasan terkait dengan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Malang

###### a. Kondisi Geografis

Kota Malang adalah salah satu kota di kota di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur dengan luas wilayah 110,06 km<sup>2</sup>. Luas wilayah tersebut dibagi menjadi 5 kecamatan, yakni kecamatan: Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, Lowokwaru. Kota ini berbatasan langsung dengan kecamatan wilayah Kabupaten Malang disetiap arahnya, yaitu: Kecamatan Singosari di sebelah utara, Kecamatan Dau di sebelah barat, Kecamatan Pakisaji di sebelah selatan dan Kecamatan Tumpang di sebelah timur.

Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya yang cukup tinggi yaitu 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Dimana daerah terendah berada di Kelurahan Telogowaru dan daerah tertinggi berada di Kelurahan Mejosari. Terletak di ketinggian menjadikan Kota Malang relatif dingin dengan suhu rata-rata 22°C–24,8°C. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh posisi Kota Malang yang dikelilingi gunung, yakni: Gunung Kawi dan Gunung Panderman di sebelah barat, Gunung Arjuno di sebelah utara dan Gunung Semeru di sebelah timur.

Pada tahun 2015 Kota Malang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.535.985 jiwa yang terdiri dari 1.257.474 jiwa penduduk laki-laki dan 1.278.511 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut menjadikan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Hal tersebut juga menjadikan laju perekonomian Kota Malang merupakan yang terpenting kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya.

**b. Visi dan Misi**

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kota Malang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya memperhatikan dan menyesuaikan RPJM Nasional. Perumusan visi dan misi dalam RPJMD Kota Malang periode 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi dan misi Kepala Daerah saja, namun juga dilakukan beberapa penyesuaian dengan beberapa acuan yang dimaksud. Visi dan misi yang termuat dalam RPJMD Kota Malang yaitu:

**“Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”**

Hal lain yang tak kalah penting dari visi di atas adalah ditentukannya Peduli Wong Cilik sebagai semangat dalam pencapaian visi. Sebagai bentuk kepedulian terhadap wong cilik, segala aktivitas dan program pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 mempertimbangkan wong cilik atau rakyat kecil yang menjadi mayoritas di Kota Malang. Seluruh hasil pembangunan

diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat dinikmati oleh semua rakyat terutama rakyat kecil.

Untuk dapat dikatakan sebagai kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya serta memiliki nilai religius yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada di tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat. Sehingga Kota Malang secara umum memiliki keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Visi BERMARTABAT merupakan akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang akan diwujudkan selama periode 2013-2018, yakni: BERSih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik. Masing-masing akronim akan dijelaskan sebagai berikut.

Bersih, Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih (*clean*

*governance*) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

Makmur, masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dimiliki pemerintah. Kondisi makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Kota Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan strategi mencapai kemakmuran kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013-2018.

Adil, terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Religius-toleran, terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus terwujudkan sepanjang 2013-2018. Dalam

masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.

Terkemuka, Kota Malang yang terkemuka dibandingkan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka dapat juga berarti kepeloporan, sehingga seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.

Aman, situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non fisik yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk

itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Malang.

Berbudaya, masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Asri, Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun keasrian Kota Malang makin lama makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

Terdidik, adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan

dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa bergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

Untuk mencapai visi yang telah disusun tersebut perlu adanya misi yang harus dilakukan. Misi merupakan penerjemah visi ke dalam pokok-pokok tujuan yang ingin dicapai. Misi pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya, dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara. (Meliputi visi: berbudaya, religius-toleran, terdidik, aman)
  - a) Pembinaan, peningkatan fasilitas penanganan dan kerjasama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  - b) Pengentasan kemiskinan.
  - c) Peningkatan keamanan lingkungan.
  - d) Peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta peran keluarga.
  - e) Pengembangan fasilitas keagamaan.
  - f) Peningkatan pendidikan politik kewarganegaraan.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur, dan akuntabel. (Meliputi visi: adil, berbudaya, bersih)

- a) Peningkatan fasilitas, efektivitas dan efisiensi pelayanan, perluasan akses publik terhadap informasi publik.
  - b) Peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.
  - c) Optimalisasi system pengendalian intern pemerintah.
- 3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis. (Meliputi visi: terkemuka, asri, makmur, adil)
- a) Pengelolaan ruang terbuka hijau serta pengolahan sampah yang baik guna penghijauan Kota Malang.
  - b) Inventarisasi lahan aset daerah dan pengendalian pemanfaatan lahan aset daerah.
  - c) Peningkatan daya dukung tata ruang kota.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global. (Meliputi visi: terkemuka, terdidik)
- a) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan.
  - b) Peningkatan kompetensi dan kualitas pemuda.
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif. (Meliputi visi: makmur, berbudaya, adil, religius-toleran)

- a) Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan serta pembinaan kesehatan keluarga melalui peningkatan program keluarga berencana.
- 6) Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya. (Meliputi visi: aman, berbudaya, bersih, terkemuka, makmur, asri)
  - a) Pengembangan destinasi pariwisata.
- 7) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif. (Meliputi visi: adil, terkemuka, makmur)
  - a) Peningkatan daya saing IKM.
  - b) Pembangunan sentra-sentra pedagang kaki lima yang layak, yang terintegrasi dengan kawasan pengembangan kota.
- 8) Mendorong produktivitas industri skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan. (Meliputi visi: bersih, berbudaya, makmur, terkemuka, asri, adil)
  - a) Optimalisasi alih teknologi tepat guna dalam pengolahan produk unggulan.
  - b) Pengembangan kawasan IKM terpadu.
- 9) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Meliputi visi: berbudaya, makmur, adil, terkemuka)

- a) Peningkatan pengendalian pemanfaatan seorang transportasi dan perhubungan terutama penanganan persoalan kemacetan di berbagai ruas jalan.
- b) Penyediaan infrastruktur dasar di wilayah miskin.

## **2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

### **a. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Sebagai dinas yang menaungi kegiatan perindustrian dan perdagangan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, pasal 2 menjelaskan bahwa dibentuk 16 dinas, termasuk di dalamnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki tugas pokok

penyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berada di perkantoran terpadu Gedung A, lantai 3, yang beralamat di Jalan Mayor Jendral Sungkono, Malang. Dalam menjalankan tugasnya di bidang perindustrian dan perdagangan, selalu berusaha untuk melaksanakan pelayanan publik yang optimal sesuai visi dan misi yang disusun.

**b. Visi dan Misi**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada visi dan misi yang telah disusun. Adapun visi tersebut adalah

**“Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang Tangguh dan Berdaya Saing sebagai Sektor Penggerak Ekonomi yang Berkeadilan.”**

Dengan visi tersebut diharapkan terwujudnya industri yang tangguh dan berdaya saing terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas, sehingga produk industri lokal Kota Malang mampu bertahan bahkan bersaing dengan derasnya arus produk impor baik dari luar daerah maupun luar negeri. Diharapkan juga menjadikan sektor industri sebagai penggerak ekonomi utama di Kota Malang dengan tetap memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi IKM.

Untuk mencapai visi yang telah disusun tersebut perlu adanya misi yang harus dilakukan. Misi merupakan penerjemah visi ke dalam pokok-pokok

tujuan yang ingin dicapai. Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang menjadi rencana strategis periode 2013-2018 adalah

**“Meningkatkan Kinerja Perdagangan dan Daya Saing Industri.”**

Untuk merealisasikan misi tersebut ditetapkan adanya tujuan dalam pembangunan industri. Tujuan pembangunan industri tersebut yaitu:

- 1) Meningkatnya daya saing industri melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi dan standarisasi industri.
- 2) Meningkatkan kinerja perdagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan terhadap konsumen.

Pada pelaksanaan visi dan misi tersebut di atas tetap harus berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berpera sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan perindustrian dan perdagangan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

## 2) Fungsi

- a) Perumusan dan pelaksana kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
- b) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perindustrian dan perdagangan.
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan asosiasi dunia usaha di bidang perindustrian dan perdagangan.
- d) Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- e) Pelaksanaan fasilitasi permodalan dan pelatihan teknis manajemen di bidang perindustrian dan perdagangan.
- f) Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok.
- g) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga.
- h) Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan ekspor impor.
- i) Pelaksanaan promosi produk industry dan usaha perdagangan.
- j) Pelaksanaan kemetrologian dan pengawasan penerapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan serta perlindungan konsumen.
- k) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perindustrian dan perdagangan.

- l) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- m) Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- n) Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- o) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
- q) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
- r) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- s) Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah.
- t) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah.
- u) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatusahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.
- v) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- w) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
- x) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
- y) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan.
- z) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah.
- aa) Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional.
- bb) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- cc) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Struktur Organisasi**

Dasar pembentukan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah:

- 1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- 2) Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, membawahi seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi. Jumlah karyawan/karyawati Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Malang sampai dengan akhir Desember 2014 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Keuangan
  - b) Sub Bagian Umum
  - c) Sub Bagian Penyusunan Program
- 3) Bidang Perindustrian Agro dan Kimia, terdiri dari:
  - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Makanan dan Minuman
  - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan
  - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia
- 4) Bidang Perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA) dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT), terdiri dari:
  - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin
  - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Tekstil dan Aneka

- c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Industri Alat Transportasi dan Telematika
- 5) Bidang Perdagangan, terdiri dari:
  - a) Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
  - b) Seksi Distribusi dan Ekspor Impor
  - c) Seksi Promosi
- 6) Bidang Perlindungan Konsumen, terdiri dari:
  - a) Seksi Pemberdayaan Konsumen
  - b) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
  - c) Seksi Kemetrolgian
- 7) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

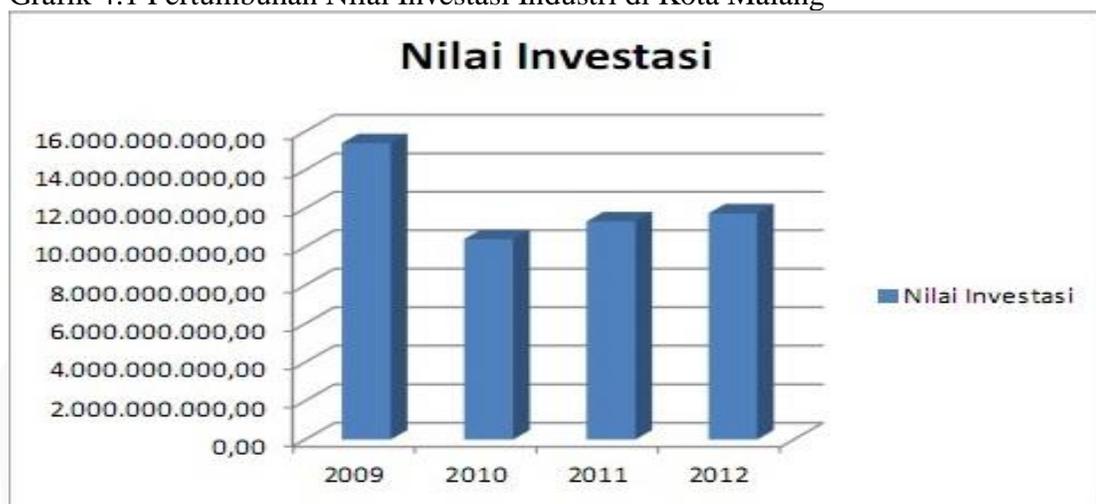
Profil sumber daya manusia aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dapat dilihat pada lampiran bagan Struktur Organisasi.

### **3. Keadaan IKM yang Ada di Kota Malang Saat Ini**

Kota Malang termasuk dalam kota yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Selain sumber daya alam yang melimpah juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten, karena Kota Malang memiliki fasilitas pendidikan lengkap sehingga menjadi kota urbanisasi bagi mereka yang ingin menimba ilmu. Adanya sinergi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat meningkatkan berkembangnya industri-industri di kota ini. Dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang periode 2013-2018

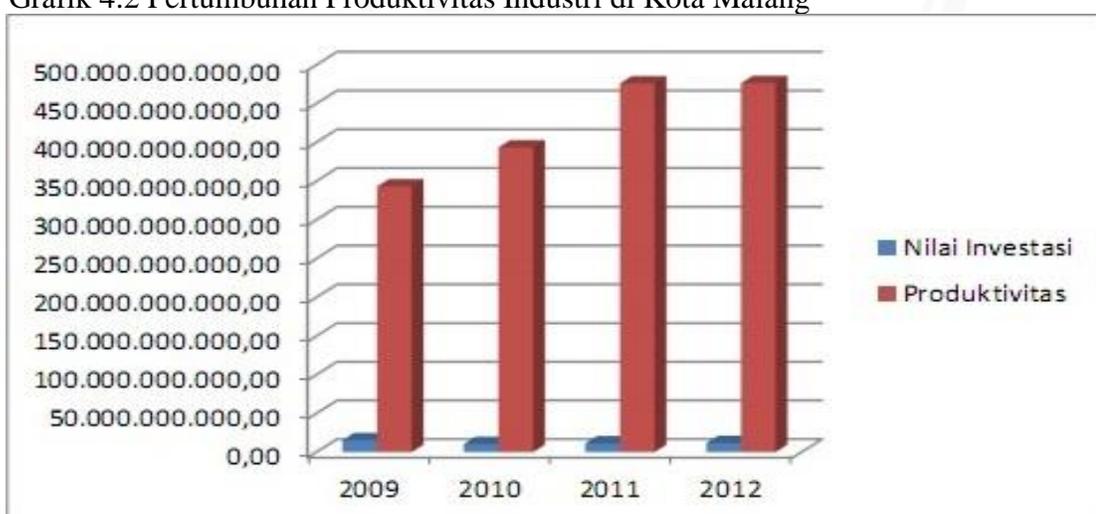
disebutkan sektor industri masih menjadi penyumbang tertinggi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan nilai investasi, produktivitas, dan tenaga kerja sektor industri terus menunjukkan peningkatan, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.1 Pertumbuhan Nilai Investasi Industri di Kota Malang



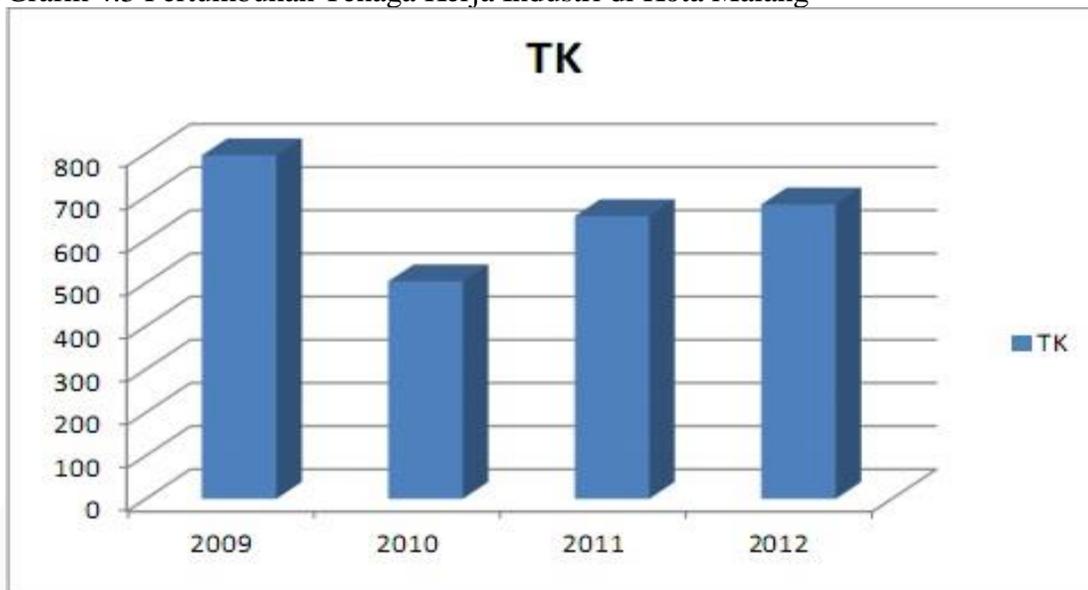
Sumber: Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang periode (2013-2018)

Grafik 4.2 Pertumbuhan Produktivitas Industri di Kota Malang



Sumber: Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang periode (2013-2018)

Grafik 4.3 Pertumbuhan Tenaga Kerja Industri di Kota Malang



Sumber: Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang periode (2013-2018)

Pada grafik di atas dapat dilihat produktivitas industri mengalami peningkatan di tiap tahun selama tahun 2009 hingga tahun 2012. Nilai investasi dan tenaga kerja juga mengalami peningkatan pada tahun 2010 hingga tahun 2012. Selama periode berlangsung kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan sudah mencapai target dan bisa dikembangkan lagi di tahun berikutnya.

Selama tahun 2010-2013 jumlah usaha industri kecil dan menengah mencapai 926 unit. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2010-2013

| Uraian                         | Tahun           |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                | 2010            | 2011            | 2012            | 2013            |
| Jumlah Unit Usaha (Unit)       | 911             | 921             | 921             | 926             |
| Jumlah Tenaga Kerja (Orang)    | 33589           | 33686           | 33686           | 33761           |
| Jumlah Nilai Investasi (M Rp.) | 283,335,870,476 | 289,965,527,476 | 289,965,527,476 | 296,040,527,476 |

Sumber: Rekapitan Pendataan Industri Tahun 2013-2018

Dari data tabel di atas menunjukkan IKM di Kota Malang berkembang, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah IKM tiap tahun.

Menurut wawancara dengan Ibu Niskha Sandriana pada tanggal 12 April 2017, selaku staf kesekretariatan menjelaskan bahwa

*“Susunan PDRB Kota Malang tertinggi terdapat pada sektor perdagangan kemudian sektor industri. Sektor industri menyumbang kurang lebih sebanyak 26,5% dari PDRB Kota Malang. Dari 26,5% penyumbang terbesar adalah sektor industri tembakau dan sisanya sebanyak kurang lebih 60%-70% dari sektor industri yang lain. Industri tembakau terdiri dari industri sedang dan besar. Untuk postur industri di Kota Malang, dari 3.045 industri hanya sebanyak 16 industri yang tergolong dalam industri besar, sedangkan sisanya merupakan IKM. Lebih dari 99% industri yang berada di Kota Malang merupakan IKM. Disinilah terlihat peran IKM cukup besar terutama untuk penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat.”*

#### **4. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam Pembinaan dan Pengembangan IKM**

Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Malang adalah dinas yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam bidang perindustrian dan perdagangan di Kota Malang. Sebagai dinas yang menaungi kegiatan perindustrian dan perdagangan, maka Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Malang memiliki peran sentral dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang. Sesuai tabel 4.1 pada kurun waktu 4 tahun terakhir jumlah sektor industri mengalami peningkatan.

Peningkatan jumlah sektor industri menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM sudah mencapai target. Pembinaan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berdasarkan renstra yang telah disusun sebagai berikut.

Tabel 4.2 Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang periode 2013-2018

| KINERJA UTAMA |  | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN  | KONDISI AWAL 2013 (jutaan) | TARGET 2015 (jutaan) |
|---------------|--|-------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| <b>TUJUAN</b> | 1. Meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi dan standarisasi industri, | PDRB Sektor industri    | PDRB industri non migas atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan | 12,090,543                 | 13,396,321           |

|                |   |  |   |
|----------------|---|--|---|
| <b>SASARAN</b> | 1.1 Meningkatnya penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri. | 1. Persentase peningkatan produk industri yang berstandarisasi | Jumlah industri yang memiliki produk terstandarisasi/jumlah total industri x 100% |
|                |   | 2. Persentase peningkatan industri yang menguasai teknologi    |   |
|                | 2.1 Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri.               | 1. Peningkatan jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi  | Jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi tahun berjalan – Jumlah IKM        |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
|  |                                    |  | yang memiliki sertifikat kompetensi tahun sebelumnya                       |
|  | 3.1 Meningkatnya inovasi industri. | 1. Persentase jumlah IKM yang melakukan inovasi produk | Jumlah industri yang melakukan inovasi produk/Jumlah total industri x 100% |

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2015

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rencana strategis yang disusun merupakan target capaian dari pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan harus sesuai dengan tujuan yang disusun pada renstra. Untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang dilakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa narasumber. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah disusun berdasarkan pedoman wawancara dan menghasilkan beberapa informasi yaitu:

- a. **Pertanyaan:** Bagaimana peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang?

**Jawaban informan:**

- 1) **Jawaban Ibu Niskha Sandriana, selaku Staf Sub Bagian Umum,**  
**mengatakan sebagai berikut:**

*“Dalam upaya pembinaan dan pengembangan seharusnya mencari permasalahan apa yang mereka alami, sehingga dapat diketahui permasalahan dalam bentuk seperti apa yang dialami dan bantuan apa yang seharusnya diberikan. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan*

*dibatasi oleh tugas pokok dan fungsi atau tupoksi, biasanya IKM ketika ditanya apa yang dibutuhkan akan menjawab mereka membutuhkan pasar dan modal, sedangkan hal tersebut merupakan diluar dari tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sebenarnya pasar juga menjadi sebagian dari tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu fasilitas pemasaran atau promosi, sedangkan untuk permodalan tidak bisa. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana IKM memiliki daya jual agar mereka survive bahkan tumbuh, karena yang paling menentukan adalah pelaku industri itu sendiri dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang turut serta berperan dalam proses mereka berkembang.”*

**2) Jawaban Ibu Dian Likos, selaku Staf Bidang Perindustrian**

**ILMETA & IATT, mengatakan sebagai berikut:**

*“Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mempunyai program pembinaan dan pengembangan IKM dan masyarakat yang ingin berwirausaha. Masyarakat yang mempunyai skill dan keinginan untuk berwirausaha diberi pelatihan agar mempunyai motivasi untuk berwirausaha dan mempunyai produk sendiri. Pelatihannya biasanya bisa berasal dari usulan masyarakat itu sendiri melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (musrenbang) atau program Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Teknis dalam pelatihan diberikan oleh instruktur khusus yang berkompeten di bidangnya, contohnya seperti pada saat kegiatan pelatihan bordir mengambil narasumber dan instruktur dari Universitas Negeri Malang, sehingga peserta pelatihan mendapatkan ilmu teknis dan ilmu berwirausaha.”*

**3) Jawaban Ibu Nurul Hidayati, selaku Pemilik IKM “Almira**

**Handmade”, mengatakan sebagai berikut:**

*“Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan IKM sejak saya ikuti tahun 2012 berupa kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Kegiatan pelatihan diinfokan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Dalam kurun waktu satu tahun biasanya diadakan sedikitnya sekitar 10 (sepuluh) kali dan saya selalu mengikuti. Terkadang dalam satu hari yang sama ada 2 (dua) kegiatan pelatihan dari dinas yang berbeda, biasanya Dinas Koperasi dan Disperindag. Saya selalu menghadiri keduanya dengan cara membagi waktu dengan suami, karena rugi apabila tidak menghadiri salah satu. Dikatakan rugi karena di setiap kegiatan pelatihan saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama dalam ilmu kewirausahaan.”*

4) **Jawaban Bapak Solehudin, selaku Pemilik IKM Keripik Tempe**

**“Amel”, mengatakan sebagai berikut:**

*“Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan terutama dengan diadakannya pelatihan sangat membantu sekali. Pelatihan yang diadakan menambah wawasan untuk mengembangkan produk, menjaga kualitas produk, cara memasarkan produk, dan lain-lain. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil setelah mengikuti pelatihan karena pelatihan meliputi berbagai aspek untuk perkembangan IKM. Selain pelatihan, juga sangat terbantu dalam hal pemasaran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenalkan para IKM dengan banyak pihak. Pameran yang melibatkan para IKM juga sangat membantu untuk pemasaran.*

**Kesimpulan:** Dilihat dari tanggapan para pelaku IKM di atas Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Malang mempunyai peran yang cukup besar dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang. Dapat disimpulkan program pembinaan dan pengembangan IKM yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang paling inti yaitu kegiatan pelatihan. Selain kegiatan pelatihan, promosi IKM melalui pameran juga menjadi salah satu bagian dalam program pembinaan dan pengembangan IKM. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dalam Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2015 disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mempunyai tujuan meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi dan standarisasi

industri. Tujuan yang akan dicapai menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mempunyai peran sentral dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melakukan pelatihan, penyuluhan, standarisasi, dan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan IKM sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun agar IKM di Kota Malang dapat berkembang dan mampu bersaing di pasar global yang semakin kompetitif.

Tabel 4.3 Pencapaian Tujuan Pembinaan dan Pengembangan IKM

| KINERJA UTAMA |   | INDIKATOR KINERJA UTAMA | KONDISI AWAL 2013 (jutaan) | TARGET 2015 (jutaan) | REALISASI (jutaan) |
|---------------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>TUJUAN</b> | 1. Meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi dan standarisasi industri | PDRB Sektor industri    | 12,090,543                 | 13,396,321           | 13,734,280         |

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian target dalam merealisasikan tujuan dengan indikator PDRB sektor industri telah mencapai target. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang sudah mencapai tujuan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang periode 2013-2018.

Pencapaian tujuan dilakukan dengan menyusun beberapa sasaran. Sasaran pertama adalah meningkatkan penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri. Penguasaan teknologi dan standarisasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing IKM di pasar global. Pada IKM masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar. Konsistensi mutu produk merupakan masalah yang masih dihadapi sebagian besar IKM. Untuk itu fokus pembinaan ditekankan pada pendekatan sistem mutu, sehingga indikator produk industri yang berstandarisasi dihitung berdasarkan pada keberadaan SOP teknis pada IKM. Hasil capaian sasaran pertama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penguasaan Teknologi dan Standarisasi Produk Industri

| <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
|---|---------------|------------------|----------------|
| 1. Persentase peningkatan produk industri yang berstandarisasi. | 11%           | 6,2%             | 56,4%          |
| 2. Persentase peningkatan industri yang menguasai teknologi.    | 45%           | 59,97%           | 133%           |
| <b>Rata-rata</b>  |               |                  | 94.7           |

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2015

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian target dalam meningkatkan produk industri yang berstandarisasi masih belum memenuhi karena sebagian besar IKM mempunyai masalah konsistensi mutu produk. Sedangkan pada peningkatan industri yang menguasai teknologi sudah mencapai target. Berdasarkan *monitoring* dan evaluasi atau *monev* yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, jumlah IKM yang sudah memiliki SOP teknis sebanyak 123 unit usaha dari 1981 unit usaha atau sebesar 6,2%.

Target tahun 2015 yang ditetapkan pada renstra sebesar 11%, maka capaian sasaran ini sebesar 56,4%.

Sasaran selanjutnya atau sasaran kedua adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri. Untuk mencapai sasaran ini disusun langkah-langkah dalam renstra yaitu fasilitasi diklat industri berbasis kompetensi, pemagangan pada perusahaan industry, dan penerapan sertifikasi kompetensi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melatih dan memfasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia di bidang industri. Target pelatihan dan sertifikasi kompetensi pada tahun 2016 sebanyak 60 IKM.

Untuk mencapai target tersebut pada tahun 2015 dilakukan pelatihan dan uji kompetensi IKM Telematika dengan *output* peserta lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi sebanyak 8 orang dari 30 peserta. Dari target penambahan jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 30 orang per tahun, tercapai sebanyak 8 orang, sehingga capain sebesar 26,7%. Bagi peserta yang lulus uji kompetensi mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP), sedangkan yang lulus uji kompetensi hanya sebagian dari 8 item yang diujikan mendapatkan surat keterangan lulus dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Tabel 4.5 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri

| Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| 1. Peningkatan jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi. | 30 IKM | 8 IKM     | 26,7%   |

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2015

Pada tabel di atas dapat dilihat pencapaian pada tahun 2015 jauh dari target, karena 70% peserta hanya mampu menguasai 7 item dari 8 item uji kompetensi, sehingga peserta yang lulus 8 item uji kompetensi dan dinyatakan kompeten hanya 26,7%. Berdasarkan data hasil money, Industri Besar dan IKM di Kota Malang yang telah memiliki sertifikasi kompetensi sebanyak 41 unit usaha dan menjadi data awal tahun renstra 2013-2018. Untuk tahun 2014 melalui kegiatan Pelatihan Uji Kompetensi Mesin Perkakas dan Las bagi IKM Logam, Mesin, dan IATT di Kota Malang, peserta yang memperoleh sertifikasi kompetensi sebanyak 30 orang dari 30 IKM peserta pelatihan. Target jangka menengah dimana pada akhir tahun 2018 harus mencapai 160 IKM yang memiliki sertifikat kompetensi, sedangkan pada tahun 2015 masih mencapai 79 IKM. Hal ini menjadi catatan penting bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk menambah kegiatan uji kompetensi, terutama untuk sektor Industri Agro dan Kimia sebagai sektor terbesar.

Sasaran selanjutnya yang menjadi sasaran terakhir adalah meningkatkan inovasi industri. Dalam proses produksi, IKM memerlukan inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Terdapat berbagai jenis inovasi, salah satunya yaitu inovasi produk. Memperhatikan karakteristik industri di Kota Malang maka indikator kinerja utama untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya inovasi industri adalah persentase peningkatan industri yang melakukan inovasi produk atau pengembangan produk.

Tabel 4.6 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Inovasi Industri

| Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| 1. Persentase peningkatan industri yang melakukan inovasi produk. | 35%    | 45,12%    | 128,9%  |

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jika peningkatan industri yang melakukan inovasi produk sudah tercapai. Melalui monev yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang diperoleh data jumlah IKM yang telah melakukan pengembangan produk sebanyak 894 unit usaha dari 1981 unit usaha. Target yang telah tercapai adalah 45,12%, sedangkan target capaian sebesar 35%, maka capaian kinerja peningkatan industri yang melakukan inovasi produk sebesar 128,9%. Peningkatan industri yang melakukan inovasi produk dilakukan dengan mengadakan berbagai pelatihan dalam inovasi produk. Pelatihan yang diadakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menurut hasil monev mampu mengembangkan inovasi berupa:

- 1) Pengembangan kemasan (desain, teknologi, maupun peningkatan kualitas bahan kemasan).
- 2) Pengembangan produk dalam berbagai rasa.
- 3) Inovasi sistem kerja berjejaring.
- 4) Diversifikasi produk, sebagai contoh dari produk towel cake berkembang ke produk flannel dan kerajinan decoupage, menghasilkan produk baru melalui perpaduan produk dengan penggunaan bahan lain.
- 5) Pengembangan peralatan produksi.

Untuk mewujudkan tercapainya sasaran ini dilakukan dua program yaitu Pengembangan IKM serta Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi. Masing-masing dari program terdiri dari 27 kegiatan dan 3 kegiatan. Bentuk pelatihan apa saja yang diselenggarakan akan diketahui melalui wawancara dengan beberapa narasumber.

- b. Pertanyaan:** Apa saja bentuk pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan bagaimana pelaksanaannya?

**Jawaban informan:**

- 1) Jawaban Bapak Agung Hariadi, selaku Kepala Seksi Bidang Elektronika dan Industri Alat Transportasi dan Telematika, mengatakan sebagai berikut:**

*“Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang fokus pembinaan dan pengembangan industri sesuai bidang masing-masing yang telah disusun. Upaya pembinaan dan pengembangan di bidang mesin dan transportasi berupa pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang diadakan diantaranya pelatihan pembuatan mesin Teknologi Tepat Guna, pelatihan ketrampilan las dan sertifikasi. Tujuan dilakukan sertifikasi keterampilan adalah untuk memberikan nilai lebih untuk pengembangan diri. Pelatihan untuk diversifikasi kreatifitas untuk mengembangkan usaha juga dilakukan, seperti contohnya bengkel las juga diberikan pelatihan bubut. Pelatihan manajemen Standar Operasional Prosedur juga diberikan, dengan tujuan agar mereka bekerja dengan lebih efektif dan efisien.”*

- 2) Jawaban Bapak Didik, selaku Staf Seksi Bidang Makanan dan Minuman, mengatakan sebagai berikut:**

*“Pelatihan yang dilakukan di bidang makanan dan minuman tidak diklasifikan berdasarkan fasenya, baik yang baru berjalan, sedang*

*berkembang, maupun bertahan belum berkembang. Pada saat kegiatan pelatihan berlangsung diharapkan para peserta pelatihan dapat berbaur antara satu dengan lainnya. Seperti contohnya pada pelatihan peningkatan produk makanan dan minuman mengambil narasumber dari Teknologi Ilmu Pangan Universitas Brawijaya. Peserta yang mengikuti tidak dibatasi berdasarkan bidang pelatihan yang diajarkan namun semua IKM di bidang makanan dan minuman dengan harapan pelaku IKM dapat mengembangkan produk mereka.”*

**3) Jawaban Ibu Ratni, selaku Pemilik IKM “Silver 999”, mengatakan sebagai berikut:**

*“Pembinaan dan pengembangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang di bidang ILMETA masih bersifat umum. Pelatihan yang saya ikuti dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa pengembangan usaha seperti seminar. Sedangkan ketika saya menjadi narasumber, saya memberikan pelatihan teknis. Sebagai IKM saya dilatih dan juga melatih, karena saling membutuhkan satu dengan yang lain.”*

**Kesimpulan:** Berdasarkan jawaban yang telah diuraikan oleh narasumber atas pertanyaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang bersifat umum. Pelatihan diadakan tidak untuk masing-masing IKM namun untuk IKM dalam satu bidang yang sama. Diharapkan pada saat kegiatan pelatihan berlangsung, para peserta dapat berbaur antara satu dengan yang lain untuk saling berbagi informasi dalam kegiatan pengembangan IKM.

c. **Pertanyaan:** Bagaimana pelaksanaan promosi IKM yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang?

1) **Jawaban Niskha Sandriana, selaku Staf Sub Bagian Umum, mengatakan sebagai berikut:**

*“Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memberikan fasilitas promosi. Promosi berbentuk pameran, misi dagang, dan e-commerce, untuk kedepan ini rencananya melakukan temu usaha yang sampai bisa menciptakan mitra kerja. Pada teknisnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan membawa produk-produk IKM ke kantor perwakilan dagang untuk dipertemukan kepada pembeli harapannya agar terjadi kontrak dagang.”*

2) **Jawaban Ibu Nurul Hidayati, selaku Pemilik IKM “Almira Handmade”, mengatakan sebagai berikut:**

*“Untuk promosi produk IKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memberikan solusi yaitu dengan diadakan pameran. Diadakannya pameran sangat membantu pemasaran. Pameran yang diadakan disesuaikan dengan produk IKM yang cocok, karena pamerannya bersifat tematis. Sehingga setiap IKM rata diikutkan pemasaran.”*

**Kesimpulan:** Berdasarkan jawaban yang telah diuraikan oleh narasumber atas pertanyaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk promosi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berupa diadakannya pameran. Pameran yang diadakan bertujuan untuk memberikan solusi masalah pemasaran yang selalu menjadi permasalahan IKM. Diselenggarakannya pameran menyertakan produk-produk IKM yang sesuai dengan tema pameran, sehingga masing-masing IKM mendapat giliran untuk ikut pameran. Dengan diadakannya pameran diharapkan IKM

dapat memiliki kemampuan mengembangkan produk berdasarkan pangsa pasar masing-masing.

- d. Pertanyaan:** Apa saja bentuk *monitoring* yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan bagaimana pelaksanaannya?

**1) Jawaban Ibu Dian Likos, selaku Staf Bidang Perindustrian**

**ILMETA & IATT, mengatakan sebagai berikut:**

*“Monitoring dilakukan dengan cara berkunjung langsung, selain itu ada beberapa IKM yang sering mengikuti pelatihan akan sering dilakukan komunikasi via telepon.”*

**2) Jawaban Bapak Agung Hariadi, selaku Kepala Seksi Bidang**

**Elektronika dan Industri Alat Transportasi dan Telematika, mengatakan sebagai berikut:**

*“Setelah pelatihan diadakan monitoring dengan meminta rekap balik. Selain dengan diberikan kuesioner, monitoring juga dilakukan dengan tanya jawab santai langsung kepada pelaku IKM. Dengan dilakukan monitoring dapat diketahui kelanjutan setelah mengikuti pelatihan.”*

**Kesimpulan:** Berdasarkan jawaban yang telah diuraikan oleh narasumber atas pertanyaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan *monitoring* yang dilakukan dengan pendekatan personal. Dengan melakukan pendekatan personal melalui tanya jawab para pelaku IKM akan merasa santai dan tidak terbebani dalam menjalankan kegiatan industri. *Monitoring* dilakukan setelah kegiatan pelatihan untuk mengetahui kelanjutan pelaku

IKM apakah dapat menerapkan materi pelatihan atau mengalami permasalahan.

- e. **Pertanyaan:** Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap permasalahan yang dialami IKM?

**1) Jawaban Bapak Agung Hariadi, selaku Kepala Seksi Bidang Elektronika dan Industri Alat Transportasi dan Telematika, mengatakan sebagai berikut:**

*“Untuk IKM yang terhambat diperalatan karena harga yang cukup tinggi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengupayakan untuk memberi bantuan alat tersebut atau mencari alternatif bagaimana merekayasa alat tersebut misalnya ada perguruan tinggi yang memiliki kemampuan membuat alat tersebut akan dijadikan narasumber untuk perakitan alat tersebut.”*

**2) Jawaban Bapak Didik, selaku Staf Seksi Bidang Makanan dan Minuman, mengatakan sebagai berikut:**

*“Permasalahan yang dialami IKM pada saat melakukan kegiatan industrinya hampir tidak ada, karena di bidang makanan dan minuman mereka membentuk paguyuban. Paguyuban tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan IKM di bidang makanan dan minuman saling berbagi pengalaman. IKM yang sudah pada fase berkembang memberi saran dan membantu IKM yang masih merintis, sehingga saling mengangkat satu dengan yang lain. Paguyuban dibentuk atas saran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memudahkan dalam memberi bantuan yang dibutuhkan para IKM. Selain itu paguyuban juga memudahkan komunikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam memberi informasi kegiatan pelatihan.”*

**3) Jawaban Ibu Nurul Hidayati, selaku Pemilik IKM “Almira Handmade”, mengatakan sebagai berikut:**

*“Permasalahan yang paling sering kita temui selama menjalankan IKM ini adalah pemasaran. Kita selalu berusaha untuk mengembangkan pemasaran.”*

*Selain pemasaran, faktor lain yang menjadi permasalahan yaitu permodalan, sedangkan pembinaan dan pengembangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang selama ini seputar pelatihan.”*

**4) Jawaban Ibu Ratni, selaku Pemilik IKM “Silver 999”, mengatakan sebagai berikut:**

*“Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menaungi banyak IKM di berbagai bidang. Dalam menanggapi permasalahan yang dialami IKM akan diberikan arahan-arahan sesuai dengan masalahnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tidak memberikan bantuan solusi yang bersifat teknis dan akan mengupayakan bantuan yang bersifat umum, seperti contohnya memberikan fasilitas studi banding.”*

**Kesimpulan:** Berdasarkan jawaban yang telah diuraikan oleh narasumber atas pertanyaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran besar terhadap permasalahan yang dialami IKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan memiliki solusi untuk masalah yang dihadapi masing-masing IKM, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menaungi banyak IKM di berbagai bidang. Maka dari itu peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam menanggapi masalah yang dialami IKM yaitu dengan memberikan arahan-arahan sesuai dengan bidang dan masalahnya, seperti mengusulkan kepada IKM dalam satu bidang yang sama untuk membentuk paguyuban. Dengan terbentuknya paguyuban maka akan timbul interaksi antar IKM sehingga terjadi pertukaran informasi untuk saling membantu dan mengangkat satu dan yang lainnya. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang juga mengupayakan untuk

dapat memberikan bantuan konkrit kepada IKM seperti misalnya bantuan peralatan produksi.

- f. Pertanyaan:** Bagaimana tanggapan pelaku IKM terhadap pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang?

- 1) Jawaban Ibu Nurul Hidayati, selaku Pemilik IKM “Almira Handmade”, mengatakan sebagai berikut:**

*“Pembinaan dan pengembangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang selama ini bersifat menyeluruh atau kurang spesifik. Contohnya diadakan pelatihan dasar seperti menjahit, pelatihan menjahit dibutuhkan oleh IKM yang akan berjalan atau baru berjalan, sedangkan IKM yang sudah berjalan dan berkembang akan merasakan kurang manfaat. Diharapkan pembinaan dan pengembangan selanjutnya diklasifikasikan tiap-tiap IKM agar kegiatan pembinaan dan pengembangan lebih tepat sasaran dan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang lebih terasa. Untuk IKM yang sedang berkembang lebih membutuhkan diadakannya temu usaha dengan tujuan terbentuknya mitra usaha, dalam hal ini peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sangat dibutuhkan terutama oleh IKM.”*

- 2) Jawaban Ibu Ratni, selaku Pemilik IKM “Silver 999”, mengatakan sebagai berikut:**

*“Dalam pembinaan dan pengembangan, menurut saya yang perlu diperhatikan adalah kegiatan pameran. Di bidang industri logam, terutama pengrajin perak, pameran sangat mempengaruhi perkembangan produk. Pameran dengan pengunjung yang ramai dan potensial menjadi referensi dalam inovasi produk, karena menjadi tahu tren perhiasan dan dapat menganalisa selera perhiasan berdasarkan usia konsumen.”*

- 3) Jawaban Bapak Solehudin, selaku Pemilik IKM Kripik Tempe “Amel”, mengatakan sebagai berikut:**

*“Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM sudah cukup bagus. Kepedulian dan bentuk bimbingan terhadap IKM juga sangat baik. Kita sebagai IKM sangat terbantu sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk pembinaan dan pengembangan. Hingga saat ini hubungan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dengan para IKM masih terjalin dengan baik, rencananya paguyuban IKM tempe akan menginduk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.”*

**Kesimpulan:** Berdasarkan jawaban yang telah diuraikan oleh narasumber atas pertanyaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa IKM merasakan langsung program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Beberapa kegiatan dalam pembinaan dan pengembangan dirasa kurang tepat sasaran. Dalam kegiatan pelatihan diharapkan untuk terbagi atas beberapa klasifikasi sesuai dengan fase IKM. Kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan masih bersifat umum, sehingga tidak tepat sasaran bagi beberapa IKM. Dalam kegiatan pameran juga dirasa kurang membantu pemasaran karena pameran yang diadakan kurang memperhatikan potensi konsumen yang akan hadir, sehingga IKM yang mengikuti kegiatan pameran tidak mendapatkan hasil yang maksimal dan juga tidak dapat mengembangkan produk mereka sesuai dengan tren. Namun di sisi lain program pembinaan dan pengembangan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapat apresiasi dari IKM, karena bentuk kepedulian dan bimbingan terhadap IKM sangat baik.

**5. Hambatan yang Ditemukan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan IKM pasti menemukan hambatan. Hambatan yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Hambatan bisa saja dari IKM sebagai objek pembinaan dan pengembangan, atau bisa saja dari teknis berlangsungnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan. Untuk lebih jelasnya mengenai hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang dilakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa narasumber.

**a. Pertanyaan:** Apa saja permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang?

**1) Jawaban Ibu Dian Likos, selaku Staf Bidang Perindustrian ILMETA & IATT, mengatakan sebagai berikut:**

*“Hambatan dalam kegiatan pembinaan salah satunya adalah peserta yang mengikuti pelatihan hanya karena ada uangnya.”*

**2) Jawaban Bapak Agung Hariadi, selaku Kepala Seksi Bidang Elektronika dan Industri Alat Transportasi dan Telematika, mengatakan sebagai berikut:**

*”Dalam pembinaan dan pengembangan tentunya terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, seperti karakter individu pelaku IKM yang sulit untuk diajak berkembang.”*

**3) Jawaban Bapak Didik, selaku Staf Seksi Bidang Makanan dan Minuman, mengatakan sebagai berikut:**

*“Hambatan dalam pelaksanaan pelatihan hampir tidak ada hambatan yang serius. Mungkin waktu pelaksanaan pelatihan ada peserta yang sangat antusias mengikuti ada juga yang tidak begitu antusias.”*

**Kesimpulan:** Berdasarkan jawaban yang telah diuraikan oleh narasumber atas pertanyaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bukan merupakan masalah yang relatif besar. Sebagian besar hambatan merupakan hal teknis yang terjadi saat kegiatan pembinaan dan pengembangan berlangsung. Hal-hal tersebut tidak sampai menyebabkan adanya perubahan dalam program pembinaan dan pengembangan. Hambatan yang disampaikan oleh Ibu Dian dan Bapak Didik bersifat kondisional, artinya akan muncul hanya pada suatu kondisi tertentu. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan tentunya telah menyusun strategi.

Hambatan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan berdasarkan wawancara di atas hanya dilihat dari sudut pandang pelaku pembinaan dan pengembangan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terdapat dua pihak yang terlibat yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan pelaku IKM. Pelaku IKM sedikit banyak tentunya juga merasakan hambatan pada saat mengikuti

pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan. Untuk itu peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku IKM terkait dengan hambatan yang mereka rasakan pada saat mengikuti pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.

**b. Pertanyaan:** Apa saja hambatan yang dirasakan pada saat mengikuti pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang?

**1) Jawaban Ibu Nurul Hidayati, selaku Pemilik IKM “Almira Handmade”, mengatakan sebagai berikut:**

*“Dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan saya mengalami hambatan-hambatan. Selama kegiatan pelatihan berlangsung pasti merasa adanya ketidakcocokan. Narasumber yang kurang kompeten dibidangnya menjadi penyebab menurunnya antusias peserta pelatihan. Namun bagi saya hal tersebut jarang sekali ditemui, karena kebanyakan kegiatan pelatihan pasti memberikan manfaat untuk pesertanya. Hambatan lain yang dirasakan cenderung merupakan masalah selama kegiatan IKM berlangsung. Permasalahan yang dimaksud adalah masalah pemasaran, selain pemasaran, faktor lain yang menjadi permasalahan yaitu permodalan. Untuk masalah pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan solusi yaitu dengan diadakan pameran. Untuk masalah permodalan selama mengikuti pembinaan dan pengembangan kita belum pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, namun*

*baru saja akan dilakukan program temu usaha yang mungkin menjadi solusi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk masalah permodalan. Kita cenderung menghindari kredit bank untuk mengatasi masalah permodalan, lebih baik bermitra daripada kredit bank. Dengan bermitra maka sistem yang diterapkan adalah bagi hasil sehingga tidak menjadi beban yang berat. Namun info mengenai kemitraan kita tidak mendapatkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan harus mencari sendiri.”*

**2) Jawaban Ibu Ratni, selaku Pemilik IKM “Silver 999”, mengatakan sebagai berikut:**

*“Selama mengikuti pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang saya tidak menemukan hambatan. Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam pelaksanaan kegiatan pameran, karena di bidang industri logam, terutama pengrajin perak, pameran sangat mempengaruhi perkembangan produk.”*

**3) Jawaban Bapak Solehudin, selaku Pemilik IKM Kripik Tempe**

**“Amel”, mengatakan sebagai berikut:**

*“Selama pembinaan dan pengembangan tidak ada hambatan yang saya rasakan. Justru IKM yang bergerak sebagai pengrajin tempe dan keripik tempe di Sanan sering mendapatkan bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Bantuan yang pernah didapatkan seperti mesin pemecah kedelai, mesin sealer untuk kemasan produk, plastik dan bantuan-bantuan lainnya. Namun terkadang bantuan yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak sinkron dengan keadaan IKM pada saat bantuan diberikan. Hal tersebut mungkin terdapat kesalahan teknis pengadaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk itu dengan dibentuknya paguyuban IKM tempe, dilakukan penyeleksian bantuan yang cocok dengan kondisi. Ke depannya, misi paguyuban ini yaitu mengusulkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan.”*

**Kesimpulan:** Berdasarkan jawaban yang telah diuraikan oleh narasumber atas pertanyaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku IKM juga tidak merasakan hambatan yang relatif besar selama mengikuti program pembinaan dan pengembangan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Hambatan yang dirasakan cenderung mengarah pada permasalahan yang dihadapi saat kegiatan IKM berlangsung. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayati, hambatan yang dirasakan bukan dari pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan itu sendiri, namun merupakan masalah yang beliau hadapi ketika kegiatan IKM berlangsung. Untuk hambatan teknis dalam pembinaan dan pengembangan seperti pemilihan narasumber pelatihan perlu diperhatikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai masukan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan selanjutnya.

Jawaban pelaku IKM sebagai narasumber atas wawancara yang dilakukan dapat dibandingkan dengan jawaban menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan berupa hambatan-hambatan teknis. Hambatan teknis tersebut terjadi ketika pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sedang berlangsung, sehingga bersifat kondisional, bukan merupakan suatu hambatan serius dan berdampak pada perubahan program pembinaan dan pengembangan yang telah disusun dalam renstra.

## 6. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan berupa hambatan teknis, atau hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sedang berlangsung. Hambatan tersebut, sesuai dengan hasil wawancara narasumber, yaitu kurangnya antusias peserta pelatihan, motivasi peserta pelatihan yang tidak sesuai dengan harapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan sulitnya pelaku IKM untuk diajak berkembang. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dilakukan wawancara dengan narasumber, yaitu.

**a. Pertanyaan:** Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk menangani hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan IKM?

**1) Jawaban Ibu Dian Likos, selaku Staf Bidang Perindustrian**

**ILMETA & IATT, mengatakan sebagai berikut:**

*“Untuk peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan hanya karena untuk mendapatkan uang tidak diinfokan lagi untuk pelatihan selanjutnya. Padahal sangat disayangkan karena pelatihan yang sama belum tentu diselenggarakan di tahun selanjutnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sudah berupaya untuk mencari peserta pelatihan yang benar-benar berminat dan berwirausaha, namun tidak menutup kemungkinan masih tetap ada peserta pelatihan yang ikut karena uang.”*

**2) Jawaban Bapak Agung Hariadi, selaku Kepala Seksi Bidang**

**Elektronika dan Industri Alat Transportasi dan Telematika,**

**mengatakan sebagai berikut:**

*“Bagi pelaku IKM yang sulit dibina karena karakter individu sulit berkembang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tidak melakukan pembinaan khusus, karena cepat atau lambat mereka akan disadarkan oleh persaingan usaha yang semakin ketat. Dengan mengalami semakin ketatnya persaingan usaha diharapkan mereka menjadi individu yang mempunyai inovasi dalam pengembangan produk. Laku atau tidaknya produk yang dipasarkan tergantung pada penilaian konsumen terhadap kualitas dan harga produk yang ditawarkan oleh IKM. Meskipun Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah memberikan upaya yang maksimal dalam pembinaan dan pengembangan IKM namun apabila SDM dari masing-masing IKM tidak mempunyai mental untuk bersaing maka akan sulit bagi IKM tersebut untuk bertahan bahkan berkembang. Seperti misalnya produk karet tabung elpiji, konsumen akan cenderung memilih produk yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia meskipun dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan produk dengan harga yang lebih murah namun tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia. Sensitifitas pelaku IKM terhadap hal-hal kecil seperti ini juga diperlukan untuk mendapatkan nilai lebih dalam persaingan pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memberikan fasilitas sertifikasi, Standar Nasional Indonesia, merek dagang, logo dan lain-lain dengan tujuan untuk meningkatkan nilai produk di pasaran.”*

**Kesimpulan:** Berdasarkan jawaban yang telah diuraikan oleh narasumber atas pertanyaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan berbeda menyesuaikan dengan hambatannya. Upaya yang dilakukan untuk menangani masing-masing hambatan sudah tepat. Peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan hanya karena untuk mendapatkan uang tidak akan diberi info apabila akan diadakan pelatihan selanjutnya, dengan harapan pada kegiatan pelatihan selanjutnya tidak akan terjadi hambatan seperti ini. Pelaku IKM yang sulit dibina akan terus diikuti dalam program pembinaan dan pengembangan. Meskipun sudah sering mengikuti program pembinaan dan pengembangan, apabila karakter individu yang sulit berkembang maka Dinas Perindustrian

dan Perdagangan tidak memberikan pembinaan khusus, dengan harapan pelaku IKM tersebut menjadi sadar dengan merasakan semakin sulitnya mengikuti persaingan pasar yang semakin ketat.

Jawaban atas upaya untuk menangani hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan IKM tersebut cukup tepat. Untuk menangani hambatan-hambatan teknis yang bersifat kondisional tidak perlu disusun secara khusus solusi yang akan dilakukan. Menanggapi permasalahan IKM yang menjadi hambatan IKM dalam mengikuti program pembinaan dan pengembangan, Ibu Niskha Sandriana selaku Staf Sub Bagian Umum mengatakan sebagai berikut:

*“Pada faktor permodalan yang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang lakukan adalah fasilitasi permodalan yaitu mengajarkan pelaku IKM agar mereka mampu menjadi IKM yang bankable, kemudian juga memberi fasilitas pada saat pelatihan bekerjasama dengan perbankan sehingga siapa saja IKM yang butuh dapat langsung berhubungan dengan bank.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berupaya untuk membantu permasalahan terbesar yang dialami oleh sebagian besar IKM meskipun dalam tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak dijelaskan untuk membantu IKM dalam masalah permodalan. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membina dan mengembangkan IKM sesuai dengan tupoksi yang kemudian disusun dalam renstra. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menyusun renstra mengacu pada visi misi walikota untuk kegiatan apa saja yang akan dilakukan, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tidak saja

menangani masalah yang sudah timbul tetapi juga mengantisipasi masalah yang punya potensi untuk timbul.

## **B. Analisis Data dan Pembahasan tentang Hasil Penelitian**

Setelah penyajian data dari hasil penelitian di lapangan mengenai objek penelitian maupun data fokus penelitian tentang pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan IKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, serta mengetahui peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data yang sudah ada. Hasil analisis dapat disajikan sebagai berikut:

### **1. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan dan Pengembangan IKM di Kota Malang**

Dari hasil wawancara dengan narasumber dan data yang didapatkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memiliki peran sentral dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang. Program pembinaan dan pengembangan IKM yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang paling inti yaitu kegiatan pelatihan. Selain kegiatan pelatihan, promosi IKM melalui pameran juga menjadi salah satu bagian dalam program pembinaan dan pengembangan IKM. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan harus sesuai dengan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dalam data yang didapatkan, upaya pembinaan dan pengembangan IKM dibatasi oleh tupoksi dan telah disusun dalam renstra. Segala aspek yang ada pada industri menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dilakukan pembinaan dan pengembangan. Industri terdiri dari *input*, proses, *output* dan manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*). Dalam input terdapat *man, material, machine, dan money*. Pada aspek *man*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang membina kompetensi kualitas sumber daya manusia industri. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melatih agar pelaku IKM semakin meningkat kemampuannya, bahkan untuk beberapa penguasaan keterampilan dilakukan uji kompetensi, sehingga mereka menjadi manusia industri yang kuat. Pada aspek *men* selanjutnya dilakukan pembinaan manajemen atau kemampuan dalam berwirausaha. Pada aspek *money*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan fasilitasi permodalan yaitu dengan mengajarkan pelaku IKM agar mereka mampu menjadi IKM yang bankable, kemudian juga memberi fasilitas pada saat pelatihan bekerjasama dengan perbankan sehingga siapa saja IKM yang butuh dapat langsung berhubungan dengan bank. Pada aspek *material* yang dulu pernah dilakukan yaitu melakukan temu usaha antara IKM dengan penyedia bahan baku terutama untuk jenis-jenis usaha yang kesulitan mendapatkan bahan baku. Pada aspek *machine* seharusnya ada penguatan teknologi untuk produksi akan tetapi karena sekarang adanya peraturan yang melarang hibah kepada perorangan dan harus kepada IKM yang berbadan hukum sehingga hibah tidak dapat dilakukan.

Yang dilakukan adalah melatih mereka bagaimana cara kerja teknologinya, contohnya teknologi pembakaran keramik maka akan diajarkan tekniknya selanjutnya pelaku IKM menyediakan sendiri agar teknologi tersebut dapat diterapkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga mengajak pelaku IKM ke tempat-tempat seperti balai industri sehingga mereka tahu teknologi yang lebih baik seperti apa.

Dalam proses industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melakukan pembinaan pengembangan atau inovasi produk, termasuk diberikan masukan desain produk, desain kemasan, dan lain-lain. Peningkatan kualitas dan kendali mutu juga tidak lupa diberikan pembinaan. Pada *output* industri diberikan pembinaan bagaimana pentingnya standarisasi sampai kepada fasilitasi untuk standarisasi produk juga fasilitasi untuk HAKI atau hak kekayaan intelektual. Selanjutnya yang terakhir adalah pemasaran, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan fasilitasi promosi. Promosi dulu berbentuk pameran, misi dagang, dan e-commerce, untuk ke depan ini rencananya melakukan temu usaha yang sampai bisa menciptakan mitra kerja. Itulah bentuk-bentuk peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM dengan tujuan IKM menjadi kuat dan tidak gampang mati sehingga sektor industri tumbuh dan sektor ekonomi dapat berkembang.

**a. Pelatihan**

Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang bersifat umum. Pelatihan diadakan tidak untuk masing-masing

IKM namun untuk IKM dalam satu bidang yang sama. Diharapkan pada saat kegiatan pelatihan berlangsung, para peserta dapat berbaur antara satu dengan yang lain untuk saling berbagi informasi dalam kegiatan pengembangan IKM.

Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berdasarkan usulan pelaku IKM melalui Musyawarah Rencana Pembangunan yang disesuaikan dengan renstra. Hal tersebut dilakukan agar pelatihan yang diadakan sesuai dengan kebutuhan pelaku IKM.

#### **b. Promosi**

Bentuk promosi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berupa diadakannya pameran. Pameran yang diadakan bertujuan untuk memberikan solusi masalah pemasaran yang selalu menjadi permasalahan IKM. Diselenggarakannya pameran menyertakan produk-produk IKM yang sesuai dengan tema pameran, sehingga masing-masing IKM mendapat giliran untuk ikut pameran. Dengan diadakannya pameran diharapkan IKM dapat memiliki kemampuan mengembangkan produk berdasarkan pangsa pasar masing-masing.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memberikan fasilitasi promosi. Promosi berbentuk pameran, misi dagang, dan e-commerce, untuk kedepan ini rencananya melakukan temu usaha yang sampai bisa menciptakan mitra kerja. Pada teknisnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan membawa produk-produk IKM ke kantor perwakilan

dagang untuk dipertemukan kepada pembeli harapannya agar terjadi kontrak dagang.

**c. *Monitoring***

Kegiatan *monitoring* yang dilakukan dengan pendekatan personal. Dengan melakukan pendekatan personal melalui tanya jawab para pelaku IKM akan merasa santai dan tidak terbebani dalam menjalankan kegiatan industri. *Monitoring* dilakukan setelah kegiatan pelatihan untuk mengetahui kelanjutan pelaku IKM apakah dapat menerapkan materi pelatihan atau mengalami permasalahan.

**2. Hambatan yang Ditemukan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bukan merupakan masalah yang relatif besar. Sebagian besar hambatan merupakan hal teknis yang terjadi saat kegiatan pembinaan dan pengembangan berlangsung. Hal-hal tersebut tidak sampai menyebabkan adanya perubahan dalam program pembinaan dan pengembangan. Hambatan yang terjadi bersifat kondisional, artinya akan muncul hanya pada suatu kondisi tertentu. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan tentunya telah menyusun strategi.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan berupa hambatan teknis, atau hambatan yang terjadi ketika

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sedang berlangsung. Hambatan tersebut, sesuai dengan hasil wawancara narasumber, yaitu kurangnya antusias peserta pelatihan, motivasi peserta pelatihan yang tidak sesuai dengan harapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan sulitnya pelaku IKM untuk diajak berkembang.

Hambatan yang dirasakan pelaku IKM cenderung mengarah pada permasalahan yang dihadapi saat kegiatan IKM berlangsung. Hambatan yang dirasakan bukan dari pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan itu sendiri, namun merupakan masalah dihadapi ketika kegiatan IKM berlangsung. Untuk hambatan teknis dalam pembinaan dan pengembangan seperti pemilihan narasumber pelatihan perlu diperhatikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai masukan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan selanjutnya.

### **3. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan berbeda menyesuaikan dengan hambatannya. Upaya yang dilakukan untuk menangani masing-masing hambatan sudah tepat. Peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan hanya karena untuk mendapatkan uang tidak akan diberi info apabila akan diadakan pelatihan selanjutnya, dengan harapan pada kegiatan pelatihan selanjutnya tidak akan terjadi hambatan seperti ini. Pelaku IKM yang sulit dibina akan terus diikutkan

dalam program pembinaan dan pengembangan. Meskipun sudah sering mengikuti program pembinaan dan pengembangan, apabila karakter individu yang sulit berkembang maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memberikan pembinaan khusus, dengan harapan pelaku IKM tersebut menjadi sadar dengan merasakan semakin sulitnya mengikuti persaingan pasar yang semakin ketat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berupaya untuk membantu permasalahan terbesar yang dialami oleh sebagian besar IKM meskipun dalam tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak dijelaskan untuk membantu IKM dalam masalah permodalan. Fasilitasi permodalan yang dimaksud yaitu mengajarkan pelaku IKM agar mereka mampu menjadi IKM yang bankable, kemudian juga memberi fasilitas pada saat pelatihan bekerjasama dengan perbankan. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membina dan mengembangkan IKM sesuai dengan tupoksi yang kemudian disusun dalam renstra. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menyusun renstra mengacu pada visi misi walikota untuk kegiatan apa saja yang akan dilakukan, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tidak saja menangani masalah yang sudah timbul tetapi juga mengantisipasi masalah yang punya potensi untuk timbul.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang. Berdasarkan data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang sudah mencapai tujuan. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan IKM dilakukan secara sistematis berdasarkan renstra yang telah disusun. Sesuai dengan renstra, bilamana indikator tujuan yaitu PDRB sektor industri, dapat dibuktikan bahwa peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang sudah mencapai tujuan.

Secara singkat peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Kota Malang yaitu pada kegiatan pelatihan, promosi, dan *monitoring*. Peranan pembinaan dan pengembangan IKM dibatasi oleh tupoksi dan telah disusun dalam renstra. Segala aspek yang ada pada industri menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dilakukan pembinaan dan pengembangan. Industri terdiri dari *input*, proses, *output* dan manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*). Dalam input terdapat *man, material, machine, dan money*. Pada aspek *man*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang membina

kompetensi kualitas sumber daya manusia industri. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melatih agar pelaku IKM semakin meningkat kemampuannya, bahkan untuk beberapa penguasaan keterampilan dilakukan uji kompetensi, sehingga mereka menjadi manusia industri yang kuat. Pada aspek *man* selanjutnya dilakukan pembinaan manajemen atau kemampuan dalam berwirausaha. Pada aspek *money*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan fasilitasi permodalan yaitu dengan mengajarkan pelaku IKM agar mereka mampu menjadi IKM yang *bankable*, kemudian juga memberi fasilitas pada saat pelatihan bekerjasama dengan perbankan sehingga siapa saja IKM yang butuh dapat langsung berhubungan dengan bank. Pada aspek *material* yang dulu pernah dilakukan yaitu melakukan temu usaha antara IKM dengan penyedia bahan baku terutama untuk jenis-jenis usaha yang kesulitan mendapatkan bahan baku. Pada aspek *machine* seharusnya ada penguatan teknologi untuk produksi akan tetapi karena sekarang adanya peraturan yang melarang hibah kepada perorangan dan harus kepada IKM yang berbadan hukum sehingga hibah tidak dapat dilakukan. Yang dilakukan adalah melatih mereka bagaimana cara kerja teknologinya, contohnya teknologi pembakaran keramik maka akan diajarkan tekniknya selanjutnya pelaku IKM menyediakan sendiri agar teknologi tersebut dapat diterapkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga mengajak pelaku IKM ke tempat-tempat seperti balai industri sehingga mereka tahu teknologi yang lebih baik seperti apa.

Dalam proses industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melakukan pembinaan pengembangan atau inovasi produk, termasuk diberikan masukan desain produk, desain kemasan, dan lain-lain. Peningkatan kualitas dan

kendali mutu juga tidak lupa diberikan pembinaan. Pada *output* industri diberikan pembinaan bagaimana pentingnya standarisasi sampai kepada fasilitasi untuk standarisasi produk juga fasilitasi untuk HAKI atau hak kekayaan intelektual.

Setelah dilakukan pelatihan, selanjutnya adalah pemasaran, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan fasilitasi promosi. Promosi dapat berbentuk pameran, misi dagang, dan *e-commerce*, untuk ke depan ini rencananya melakukan temu usaha yang sampai bisa menciptakan mitra kerja.

Kegiatan *monitoring* menjadi fase terakhir dalam pembinaan dan pengembangan. *Monitoring* yang dilakukan dengan pendekatan personal. Dengan melakukan pendekatan personal melalui tanya jawab para pelaku IKM akan merasa santai dan tidak terbebani dalam menjalankan kegiatan industri. *Monitoring* bertujuan untuk mengetahui kelanjutan pelaku IKM apakah dapat menerapkan materi pelatihan atau mengalami permasalahan. Itulah bentuk-bentuk peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM dengan tujuan IKM menjadi kuat dan tidak gampang mati sehingga sektor industri tumbuh dan sektor ekonomi dapat berkembang mengingat peran IKM cukup besar terutama untuk penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan masyarakat.

Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bukan merupakan masalah yang relatif besar. Sebagian besar hambatan merupakan hal teknis yang terjadi saat kegiatan pembinaan dan pengembangan berlangsung. Hambatan tersebut, sesuai dengan hasil wawancara narasumber, yaitu kurangnya antusias peserta pelatihan,

motivasi peserta pelatihan yang tidak sesuai dengan harapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan sulitnya pelaku IKM untuk diajak berkembang.

Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan berbeda menyesuaikan dengan hambatannya. Upaya yang dilakukan untuk menangani masing-masing hambatan sudah tepat. Peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan hanya karena untuk mendapatkan uang tidak akan diberi info apabila akan diadakan pelatihan selanjutnya, dengan harapan pada kegiatan pelatihan selanjutnya tidak akan terjadi hambatan seperti ini. Pelaku IKM yang sulit dibina akan terus diikutkan dalam program pembinaan dan pengembangan. Meskipun sudah sering mengikuti program pembinaan dan pengembangan, apabila karakter individu yang sulit berkembang maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memberikan pembinaan khusus, dengan harapan pelaku IKM tersebut menjadi sadar dengan merasakan semakin sulitnya mengikuti persaingan pasar yang semakin ketat.

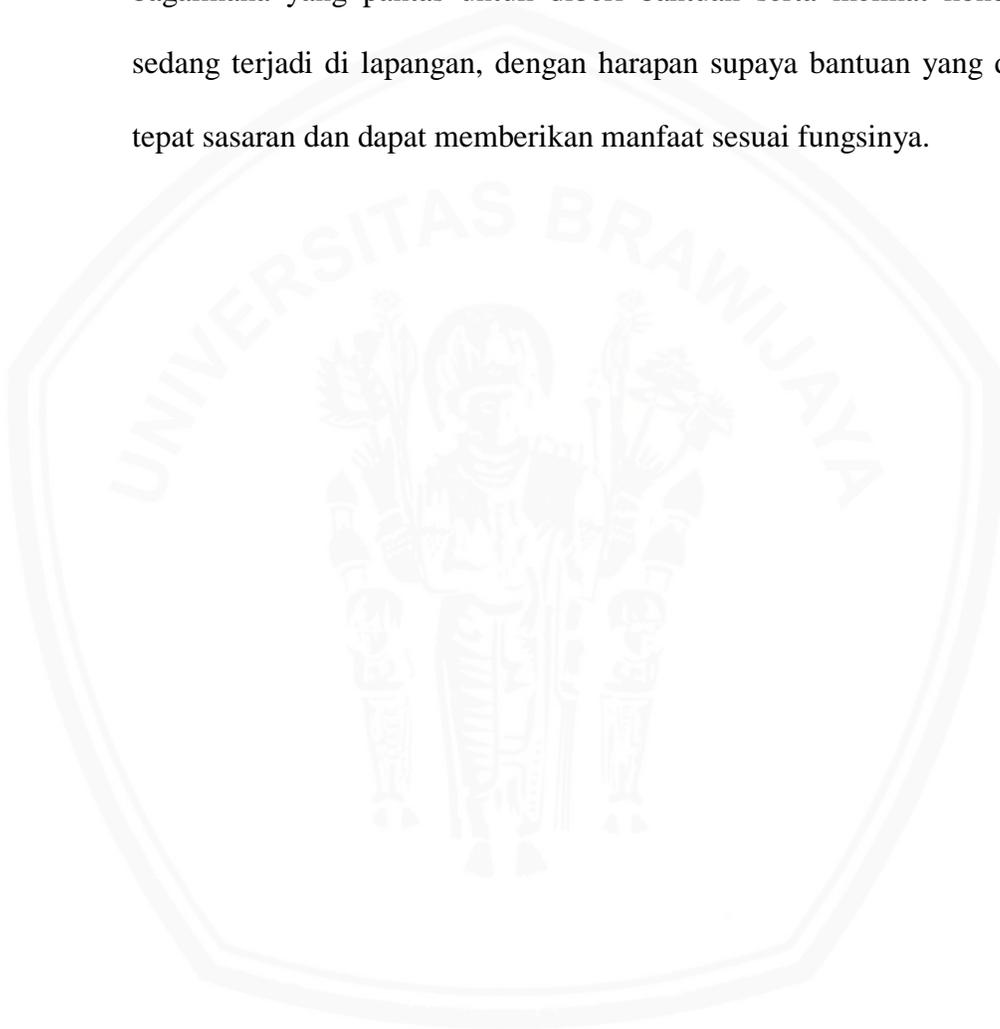
## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan IKM yang disusun dalam renstra sudah baik. Dalam renstra sasaran-sasaran kegiatan yang disusun masih bersifat umum. Saran yang diberikan yaitu agar sasaran-sasaran kegiatan yang disusun pada renstra bersifat lebih spesifik, sehingga permasalahan yang dialami oleh para IKM dapat teratasi dengan lebih baik terutama pada kegiatan pelatihan yang diadakan.

2. Kegiatan pelatihan yang diadakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan dan disesuaikan dengan renstra. Penyusunan kegiatan pelatihan tersebut sudah baik. Saran yang diberikan yaitu agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang juga memperhatikan skala prioritas pelatihan mana yang harus dahulu diadakan berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang sedang dialami pelaku IKM.
3. Kegiatan pameran yang diadakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sangat membantu para pelaku IKM dalam masalah pemasaran. Namun sebaiknya, penyelenggaraan kegiatan pameran juga mempertimbangkan potensi konsumen yang menghadiri pameran tersebut. Dengan mempertimbangkan potensi konsumen, secara tidak langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang juga memberikan praktek langsung kepada pelaku IKM mengenai persaingan pasar dimana pengembangan dan konsistensi mutu produk menjadi nilai tambah untuk dapat bersaing.
4. Pada kegiatan *monitoring*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kurang menunjukkan perannya sebagai dinas yang bertanggung jawab atas perkembangan IKM. Dilakukannya *monitoring* dengan pendekatan personal sudah baik, namun lebih baik jika dilakukan dengan memberikan kuesioner terstruktur dengan tujuan agar IKM mempunyai tanggung jawab untuk berkembang setelah melakukan kegiatan pelatihan.

5. Pemberian bantuan kepada IKM terutama peralatan produksi sangat membantu IKM dalam menjalankan kegiatan produksinya. Saran yang diberikan untuk pemberian bantuan peralatan yaitu agar lebih memperhatikan skala prioritas bantuan apa yang tepat untuk diberikan dan IKM yang bagaimana yang pantas untuk diberi bantuan serta melihat kondisi yang sedang terjadi di lapangan, dengan harapan supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat sesuai fungsinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Index.
- Hasan, M. Iqbal. 2003. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Iwantono, Sutrisno. 2003. *Kiat Sukses Berwirausaha Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Grasindo.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Nazir, Moh. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*. Jakarta: Alfabeta.
- Soerjono, Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

### Internet:

- BPS. 2016. “*Konsep dan Definisi Perusahaan Industri Pengolahan*”, diakses 17 Desember 2016 dari <http://www.bps.go.id/>

### Peraturan Perundang-undangan:

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Diakses 15 Desember 2016 melalui <http://www.hukumonline.com>
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Diakses 17 Desember 2016 melalui <http://www.hukumonline.com>

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Diakses 16 Desember 2016 melalui <http://www.hukumonline.com>

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Diakses 16 Desember 2016 melalui <http://www.hukumonline.com>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Diakses 15 desember 2016 melalui <http://www.hukumonline.com>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Diakses 15 Desember 2016 melalui <http://www.hukumonline.com>

#### **Dokumen Resmi:**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2014. *Rencana Strategis*. Malang: Disperindag.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2014. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Surabaya: Disperindag.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2016. *Perkembangan Industri & Perdagangan Jawa Timur 2016 dan Evaluasi Data Industri Jawa Timur 2016*. Surabaya: Disperindag.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Tahun 2011-2015

#### **Skripsi:**

Arysta Putra, Candra. 2014. *Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak sebagai Produk Unggulan Daerah*

Rosianti, Windy. 2014. *Upaya Dinas Koperasi UKM dalam Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan untuk Meningkatkan Motivasi Berwirausaha*.

Subekti, Lianda. 2013. *Implementasi Strategi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM*.